



RANCANGAN AWAL
RENSTRA

RENCANA STRATEGIS

Kecamatan Pondokmelati
Kota Bekasi

2025 - 2029



www.kec.pondokmelati.bekasikota.go.id



KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga dokumen Rancangan Awal Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pondokmelati Tahun 2025-2029 ini dapat diselesaikan.

Dokumen Renstra ini disusun sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik di Kecamatan Pondokmelati selama lima tahun ke depan. Rancangan Awal Renstra ini dirancang dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi Tahun 2025-2029, serta memperhatikan potensi, permasalahan, dan aspirasi masyarakat di wilayah Kecamatan Pondokmelati.

Rancangan Awal Renstra ini mencerminkan komitmen kami dalam mewujudkan Kecamatan Pondokmelati yang lebih maju, aman, sejahtera, dan berdaya saing. Kami berharap dokumen ini dapat menjadi landasan bagi seluruh aparatur dan pemangku kepentingan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, serta sebagai instrumen untuk mengukur pencapaian kinerja pemerintahan kecamatan.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan Rancangan Awal Renstra ini, mulai dari instansi pemerintah, organisasi kemasyarakatan, hingga seluruh lapisan masyarakat yang telah memberikan masukan dan dukungan. Semoga Renstra ini dapat menjadi panduan yang efektif dalam pencapaian visi dan misi Kecamatan Pondokmelati, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Demikian kata pengantar ini kami sampaikan. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan petunjuk dan perlindungan kepada kita semua dalam menjalankan amanah pembangunan di Kecamatan Pondokmelati.

Bekasi, 2025

Camat Pondokmelati,



Heryanto, A.P., M.Si.

Pembina Tingkat I, IV/b

NIP. 19750717 199603 1 003



DAFTAR ISI

	Kata Pengantar	i
	Daftar Isi	ii
	Daftar Tabel	iii
BAB I	PENDAHULUAN	1
1.1	Latar Belakang	1
1.2	Landasan Hukum	2
1.3	Hubungan Antar Dokumen Perencanaan	4
1.4	Maksud dan Tujuan	5
1.5	Sistematika Penulisan	6
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	8
2.1	Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah	8
2.1.1	Tugas, Fungsi Dan Struktur Perangkat Daerah	8
2.1.2	Sumber Daya Kecamatan Pondokmelati	13
2.1.3	Kinerja Pelayanan Pada Kecamatan Pondokmelati	17
2.1.4	Kelompok Sasaran Layanan	20
2.1.5	Mitra Perangkat Daerah Dalam Pemberian Pelayanan	21
2.1.6	Dukungan Bumd Dalam Rangka Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah	22
2.1.7	Kerja Sama Daerah Yang Menjadi Tanggung Jawab Perangkat Daerah	23
2.2	Permasalahann Dan Isu Strategis Perangkat Daerah	24
2.2.1	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	24
2.2.2	Isu Strategis	25
BAB III	TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	27
3.1	Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Pondokmelati Tahun 2025-2029	27
3.2	Strategi Dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah Dalam Mencapai Tujuan Dan Sasaran Renstra Pd Tahun 2025-2029	32
BAB IV	RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	37
4.1	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	37
4.2	Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan	48
4.2.1	Indikator Kinerja Utama	
BAB V	PENUTUP	50



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Jumlah pegawai kecamatan pondokmelati berdasarkan Jabatan	15
Tabel 2.2	Data Pendidikan Pegawai Kecamatan Pondokmelati	15
Tabel 2.3	Kondisi Kepegawaian berdasarkan Pangkat dan Golongan	16
Tabel 2.4	Data Sarana dan Prasarana Kecamatan Pondokmelati	35
Tabel 2.5	Capaian Kinerja Pelayanan Tahun 2020 – 2024	18
Tabel 2.6	Isu Strategis Kecamatan Pondokmelati	26
Tabel 3.1	Rumusan Tujuan dan Sasaran Kecamatan Pondokmelati	29
Tabel 3.3	Penahapan Renstra PD	34
Tabel 3.4	Strategi Dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah Dalam Mencapai Tujuan Dan Sasaran Renstra Pd	35
Tabel 4.2	Rumusan Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Perangkat Daerah	38
Tabel 4.3	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra PD	40
Tabel 4.4	Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	47
Tabel 4.5	Indikator Kinerja Utama PD	48



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kecamatan Pondokmelati merupakan salah satu kecamatan di Kota Bekasi yang memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan daerah. Sebagai bagian dari pemerintah daerah, Kecamatan Pondokmelati berfungsi sebagai garda terdepan dalam penyelenggaraan pelayanan publik, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat. Dalam rangka menjalankan peran tersebut, diperlukan sebuah perencanaan strategis yang terarah dan terpadu, sesuai dengan visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah.

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pondokmelati Tahun 2025-2029 ini disusun sebagai dokumen perencanaan yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program, dan kegiatan prioritas selama lima tahun ke depan. Penyusunan Renstra ini didasarkan pada kebutuhan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, mempercepat pembangunan wilayah, serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kecamatan Pondokmelati sesuai dengan potensi dan tantangan yang ada.

Selain itu, Renstra ini juga disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi Tahun 2025-2029, yang menjadi pedoman pembangunan di tingkat kota. Renstra ini diharapkan dapat mendukung pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD, dengan mempertimbangkan karakteristik wilayah, permasalahan yang dihadapi, serta aspirasi masyarakat Kecamatan Pondokmelati.

Dalam proses penyusunannya, Renstra Kecamatan Pondokmelati Tahun 2025-2029 melibatkan berbagai pihak, termasuk aparatur pemerintahan, organisasi kemasyarakatan, serta masyarakat setempat, guna memastikan bahwa rencana yang dihasilkan relevan dan dapat diimplementasikan dengan efektif.

Dengan tersusunnya Renstra ini, Pemerintah Kecamatan Pondokmelati berkomitmen untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, memperkuat sinergi dengan berbagai pemangku

Paraf Koordinasi	
Camat Pondokmelati	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	



kepentingan, serta mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang ada untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan, adil, dan merata.

1.2. Landasan Hukum

Renstra Kecamatan Pondokmelati Tahun 2025-2029 disusun atas:

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- d. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238);
- e. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Barat (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6866);
- f. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 76);
- g. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194);
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Paraf Koordinasi	
Camat Pondokmelati	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	



- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);
- i. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 - j. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
 - k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Reviu Atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 462);
 - l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 - m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 - n. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 - o. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023;
 - p. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);
 - q. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2022 Nomor 13);
 - r. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bekasi Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2024 Nomor 7); dan

Paraf Koordinasi	
Camat Pondokmelati	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	



- s. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bekasi Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2024 Nomor 12).
- t. Peraturan Wali Kota Kota Bekasi Nomor 11 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bekasi Tahun 2026.

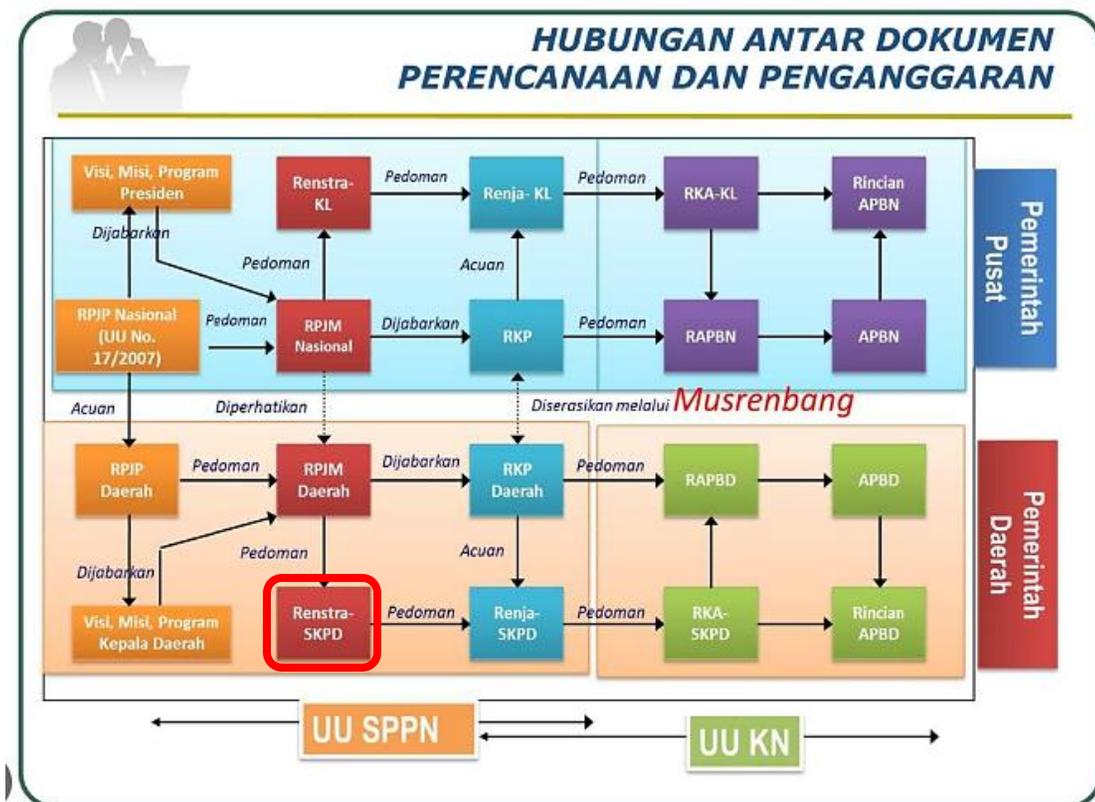
1.3 HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN PERENCANAAN

Rancangan Awal Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pondokmelati Tahun 2025-2029 disusun sebagai bagian dari upaya untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi Tahun 2025-2029. Rencana pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Artinya bahwa dokumen perencanaan pembangunan Kecamatan Pondokmelati disusun dengan memedomani dan memperhatikan dokumen perencanaan pembangunan lainnya. Dokumen perencanaan lainnya dapat berupa dokumen perencanaan pada jenjang di atasnya (Pemerintah Kota, Provinsi dan Nasional) ataupun dokumen sektoral lainnya yang setara dengan dokumen yang disusun dalam konteks Perangkat Daerah pada Tingkat Kota Bekasi. Dokumen lainnya yang dipedomani yaitu Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bekasi Tahun 2024-2044. Tujuan memedomani RTRW ini yaitu untuk menyelaraskan rencana struktur ruang, rencana pola ruang dan rencana strategis Kecamatan Pondokmelati Tahun 2025-2029.

Dokumen perencanaan yang juga harus dipedomani yaitu RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029 dan RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025-2029. Kedua dokumen tersebut perlu diakomodasi dalam Rencana Strategis Kecamatan Podokmelati Tahun 2025-2029 terutama berkaitan dengan isu strategis, tujuan dan sasaran, program prioritas, strategi, dan arah kebijakan pembangunan dari masing-masing dokumen tersebut.

Paraf Koordinasi	
Camat Pondokmelati	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Gambar 1.1 Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan



Sumber : Dokumen Perencanaan Tahun 2025-2029, diolah

Selain dokumen di atas, penyusunan Dokumen Renstra Kecamatan Pondokmelati Kota Bekasi Tahun 2025-2029 juga harus memperhatikan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun 2024-2025 sebagai bagian masukan dalam perumusan Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah. Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang berisi tentang daya dukung dan daya tampung lingkungan, pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) dan rekomendasi isu strategis juga perlu diakomodasi dalam Renstra Kecamatan Pondokmelati Kota Bekasi Tahun 2025-2029 ini, sedangkan RKPD merupakan pedoman bagi Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) dan menjadi pedoman Kepala Daerah dan DPRD dalam menentukan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan penentuan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rancangan APBD.

Paraf Koordinasi	
Camat Pondokmelati	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	



1.4 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renstra Kecamatan Pondokmelati Kota Bekasi Tahun 2025-2029 adalah untuk memberikan pedoman perencanaan pembangunan 5 (lima) tahun ke depan sesuai dengan visi, misi, dan program prioritas Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi. Adapun tujuan penyusunan Renstra Kecamatan Pondokmelati Kota Bekasi Tahun 2025-2029 adalah:

1. **Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik:** Memberikan layanan yang lebih efisien, transparan, dan berkualitas kepada masyarakat, serta memenuhi kebutuhan dan harapan warga Kecamatan Pondokmelati.
2. **Mendorong Pembangunan Infrastruktur dan Fasilitas Umum:** Mengembangkan dan memperbaiki infrastruktur serta fasilitas umum untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan wilayah.
3. **Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan:** Menjamin bahwa semua kegiatan pembangunan dilakukan dengan memperhatikan aspek keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan sosial.
4. **Meningkatkan Partisipasi Masyarakat:** Mengajak masyarakat untuk aktif berpartisipasi dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan serta pengambilan keputusan.
5. **Pengembangan Ekonomi Lokal:** Meningkatkan potensi ekonomi lokal melalui pemberdayaan UMKM, penciptaan lapangan kerja, dan dukungan terhadap sektor-sektor ekonomi yang berkembang di Kecamatan Pondokmelati.
6. **Peningkatan Kesejahteraan Sosial:** Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui peningkatan akses terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan program sosial lainnya.
7. **Pengelolaan Lingkungan:** Melaksanakan program-program yang berfokus pada pelestarian lingkungan, pengelolaan sampah, dan penciptaan ruang terbuka hijau yang berkualitas.

Paraf Koordinasi	
Camat Pondokmelati	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	



1.5 Sistematika Penulisan

Renstra Kecamatan Pondokmelati 2025-2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi penjelasan terkait latar belakang penyusunan, dasar hukum yang digunakan, keterkaitan antar dokumen perencanaan, maksud dan tujuan penyusunan serta sistematika penyajian dokumen.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN PONDOKMELATI

Bab ini berisi penjelasan terkait gambaran umum 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah, Sumber Daya Perangkat Daerah, Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS KECAMATAN PONDOKMELATI

Memuat identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Perangkat Daerah; 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih; Telaahan Renstra Kementrian/Lembaga dan Renstra Perangkat Daerah dan 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Membahas dan menjabarkan tentang Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan kecamatan Pondokmelati dalam lima tahun mendatang.

BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

Paraf Koordinasi	
Camat Pondokmelati	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	



BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD

BAB VIII PENUTUP

Pada bab ini berisi mengenai kesimpulan dan saran/rekomendasi dari laporan rencana strategis Kecamatan Pondokmelati Kota Bekasi.

Paraf Koordinasi	
Camat Pondokmelati	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Pasal 50 dijelaskan bahwa kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa atau sebutan lain dan kelurahan.

2.1.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 92 Tahun 2016 Tentang kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Kecamatan Kota Bekasi, Camat bantu oleh Sekretaris Kecamatan yang mengelola Perencanaan, Kepegawaian, Umum dan Keuangan. Dalam rangka terwujudnya motto Kecamatan Pondokmelati "Pondokmelati Menyala Bosku" apabila diartikan "Menyenangkan dalam Pelayanan", kami berkomitmen untuk:

- Cepat & Responsif – Layanan tanpa ribet, langsung tuntas
- Ramah & Humanis – Senyum, sapa, dan solusi untuk semua
- Inovatif & Mudah – Pelayanan modern yang gampang diakses
- Transparan & Akuntabel – Jujur, terbuka, dan bisa dipercaya.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Camat didukung oleh 5 (lima) Seksi yaitu:

1. Seksi Pemerintahan mempunyai tugas membantu camat melaksanakan kewenangan Kecamatan di bidang pemerintahan sesuai ketentuan yang berlaku
2. Seksi pemberdayaan masyarakat mempunyai tugas membantu camat melaksanakan kewenangan kecamatan di bidang Pemberdayaan masyarakat .
3. Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas membantu camat melaksanakan kewenangan kecamatan di bidang Kesejahteraan Sosial
4. Seksi Ekonomi Pembangunan menangani mempunyai tugas membantu camat melaksanakan kewenangan kecamatan di bidang Ekonomi dan Pembangunan

Paraf Koordinasi	
Camat Pondokmelati	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	



5. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum menangani mempunyai tugas membantu camat melaksanakan kewenangan kecamatan di bidang ketentraman dan Ketertiban sesuai ketentuan yang berlaku.

Sebagaimana Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah Kecamatan Pondokmelati sebagai ujung tombak pelayanan maka dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

a. Tupoksi Camat

Sebagaimana dijelaskan pada Bab II bahwa Tugas Pokok dan Fungsi Camat adalah mengkoordinasikan seluruh seksi yang berada dalam kewenangannya termasuk didalamnya Kelurahan, sehingga bagaimana perjalanan kebijakan Kecamatan selalu bersinergi dengan kebijakan Pemerintah Kota Bekasi. Terkait pelaksanaan kebijakan ditingkat Kecamatan menyesuaikan dengan kondisi geografis dan demografi wilayah tersebut. Camat juga berperan sebagai kepala wilayah (wilayah kerja, namun tidak memiliki daerah dalam arti daerah kewenangan), karena melaksanakan tugas umum pemerintahan di wilayah kecamatan, khususnya tugas-tugas atributif dalam bidang koordinasi pemerintahan terhadap seluruh instansi pemerintah di wilayah kecamatan, penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban, penegakan peraturan perundang-undangan, pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan, serta pelaksanaan tugas pemerintahan lainnya yang belum dilaksanakan oleh pemerintahan desa/kelurahan dan/atau instansi pemerintah lainnya di wilayah kecamatan.

b. Tupoksi Sekretaris Kecamatan

Tupoksi utama dari sekretaris Kecamatan adalah membantu Camat dalam bidang kesekretariatan, baik kesekretariatan internal maupun eksternal tentunya dengan tetap mengacu pada hasil koordinasi yang dilakukan Camat. Mencakup didalamnya bidang Umum, Kepegawaian dan Keuangan, sehingga perlu adanya penanganan yang khusus dalam menghadapi kompleksitas permasalahan yang ada pada masyarakat maupun Organisasi Perangkat Daerah itu sendiri. Pendekatan komunikasi secara berjenjang sangat direkomendasikan dalam menyikapi isu – isu dan permasalahan yang berkembang, namun pemberian pemahaman yang detail pada suatu permasalahan merupakan salah satu upaya yang

Paraf Koordinasi	
Camat Pondokmelati	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	



disarankan, sehingga peningkatan kapasitas sumber daya aparatur menjadi faktor utama keberhasilan pelayanan kepada masyarakat.

c. Tupoksi Seksi Pemerintahan

Miniatur kinerja Pemerintah Kota Bekasi maupun Kecamatan bisa terbaca dalam pelayanan kependudukan, sehingga kemampuan dan perilaku aparatur menjadi gambaran terhadap pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Peningkatan kapasitas pelayanan kepada masyarakat dapat dilakukan melalui pembinaan karakter dan perbaikan metode pelayanan, sehingga masyarakat sebagai penerima manfaat akan sangat merasa puas apabila dapat terlayani dengan baik dan prima.

d. Tupoksi Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Sebagai penegak pelaksanaan Perda, maka jumlah, kapasitas, kemampuan, sikap dan perilaku menjadi faktor utama dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat terhadap Peraturan Daerah yang ada dan diterapkan oleh Pemerintah Kota Bekasi, artinya bahwa setiap sumber daya aparatur harus memahami bentuk – bentuk pendekatan kepada masyarakat, bagaimana berkomunikasi yang baik kepada masyarakat, bagaimana memahamkan masyarakat pinggiran terhadap pelaksanaan Perda, sehingga meminimalisir kesalah pahaman terhadap penerapan Perda kepada masyarakat.

e. Tupoksi Seksi Kesejahteraan Sosial

Kompleksitas permasalahan perangkat daerah tidak luput dari permasalahan sosial yang ada didalam masyarakat, kembali pada bagaimana kapasitas sumber daya aparatur dalam menangani permasalahan sosial yang ada. Bagaimana sumber daya aparatur melihat permasalahan utama yang sebenarnya terjadi didalam masyarakatnya, bagaimana menghadapi heterogenitas masyarakat dan bagaimana kepekaan dan kepedulian sumber daya aparatur kepada masyarakat menjadi pekerjaan rumah yang wajib dicarikan solusinya. Salah satu permasalahan diwilayah yang membutuhkan penanganan yang intensif adalah bagaimana meningkatkan taraf hidup masyarakatnya dalam bidang perekonomian.

f. Tupoksi Seksi Ekonomi dan Pembangunan

Bagaimana memastikan perencanaan pembangunan sarana prasarana/infrastruktur yang berkelanjutan mempunyai dampak langsung yang dirasakan warga masyarakat dapat berjalan dengan baik

Paraf Koordinasi	
Camat Pondokmelati	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	



dan lancar. Fasilitasi musrenbang tingkat Kecamatan, jaring aspirasi (Reses) maupun usulan langsung masyarakat kepada Perangkat Daerah/ Stakeholder merupakan pemberdayaan masyarakat dalam perencanaan pembangunan sehingga optimalisasi pembangunan yang tepat sasaran dapat memicu peningkatan kesejahteraan masyarakat.

g. Struktur Organisasi Kecamatan Pondokmelati

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kecamatan, kecamatan adalah unsur perangkat daerah yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah dengan tugas pokok membantu Walikota dalam menyelenggarakan kewenangan di bidang perencanaan umum dan strategis yang mencakup seluruh bidang kewenangan pemerintah serta mengevaluasi pelaksanaannya. Camat dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah, ayat (3) dan ayat (4) dibantu oleh perangkat kecamatan. Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) dibedakan dalam 2 (dua) tipe. Tipe kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. Kecamatan tipe A untuk mewadahi pelaksanaan tugas kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) dengan beban kerja yang besar. Kecamatan tipe A terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 5 (lima) seksi, Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas 2 (dua) subbagian;
- b. Kecamatan tipe B untuk mewadahi pelaksanaan tugas kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) dengan beban kerja yang kecil, Kecamatan tipe B terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 4 (empat) seksi, Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas 2 (dua) subbagian.

Struktur Organisasi Kecamatan Pondokmelati terdiri dari :

a. Kecamatan :

- a. Camat;
- b. Sekretaris Kecamatan, membawahi :
 - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - Sub Bagian Keuangan.
- c. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- d. Seksi Kesejahteraan Sosial;

Paraf Koordinasi	
Camat Pondokmelati	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	



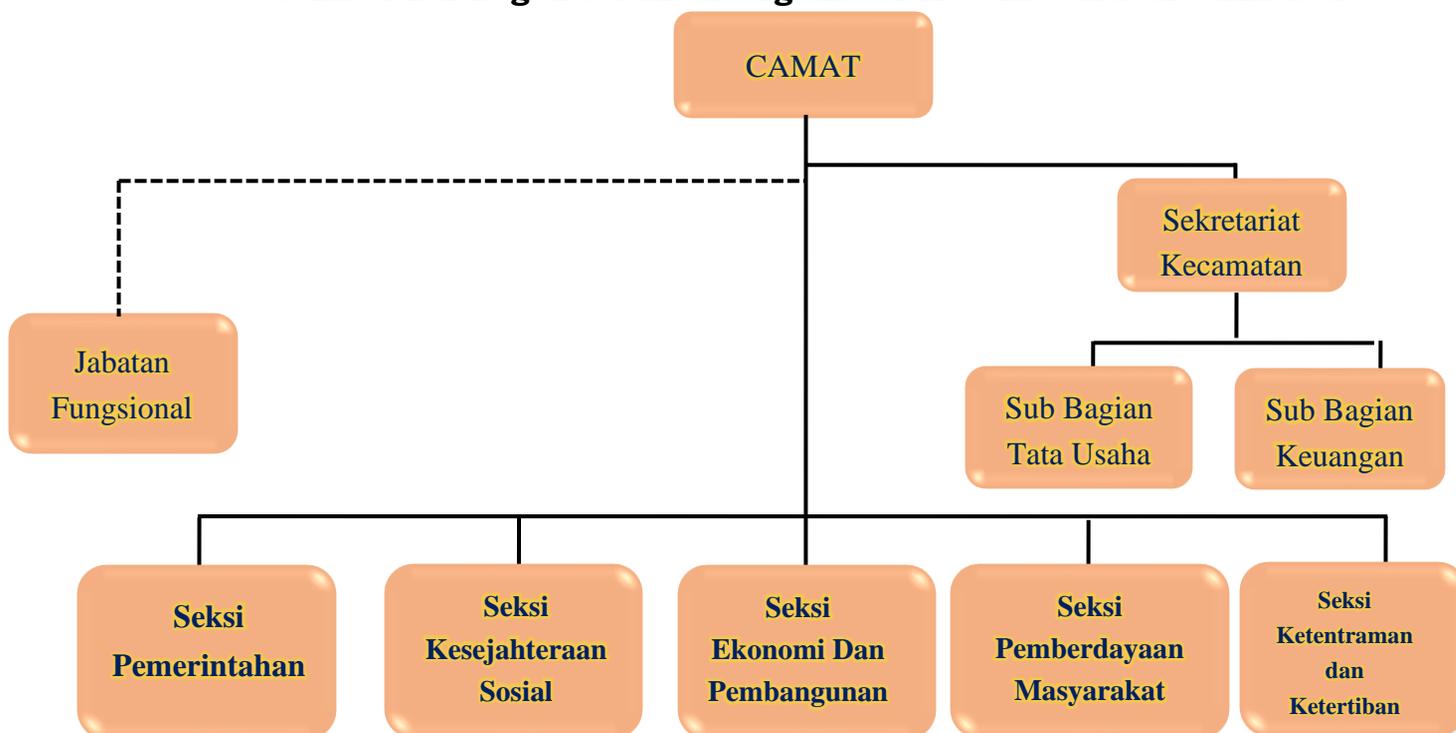
- e. Seksi Perekonomian dan Pembangunan;
- f. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
- g. Seksi Pemerintahan.

b. Kelurahan :

Kelurahan terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 3 (tiga) seksi diantaranya :

- 1 . Lurah;
2. Sekretaris Kelurahan;
3. Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum;
4. Seksi Kesejahteraan Sosial;
5. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan.

Gambar 2.1 Bagan Struktur Organisasi Kecamatan Pondokmelati



Sumber :Bagan Struktur Organisasi Kecamatan Pondokmelati, diolah

Sedangkan Kelurahan dipimpin oleh seorang Kepala Kelurahan yang disebut Lurah. selaku pemimpin unit kerja dibawah Kecamatan dan bertanggung jawab kepada Camat. Lurah diangkat oleh Bupati/Wali Kota atas usulan atau rekomendasi Sekretaris Daerah dari kalangan Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lurah mempunyai Fungsi :

- a. Melaksanakan kegiatan pemerintahan kelurahan;
- b. Melakukan pemberdayaan masyarakat;
- c. Melaksanakan pelayanan masyarakat;

Paraf Koordinasi	
Camat Pondokmelati	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

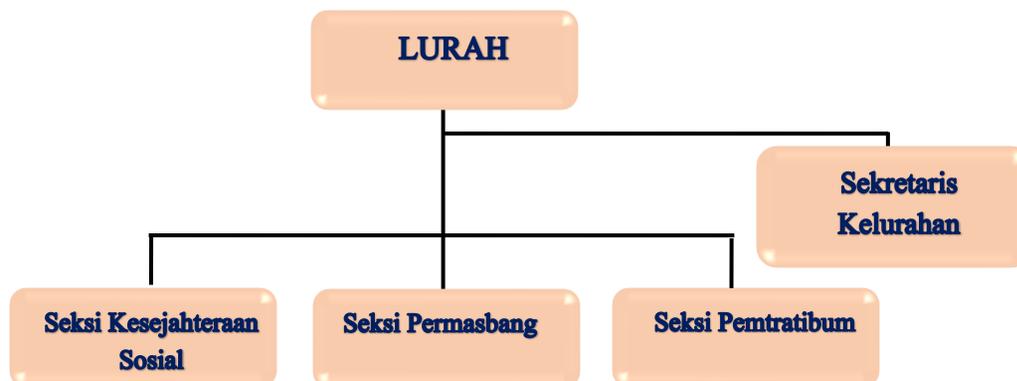


- d. Memelihara ketentraman dan ketertiban umum;
- e. Memelihara prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh camat dan;
- g. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangn-undangan.

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 93 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja pada Kelurahan Kota Bekasi, maka susunan organisasi kelurahan terdiri atas :

- Lurah;
- Sekretaris Kelurahan;
- Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- Seksi Kesejahteraan Sosial;
- Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan.

Gambar 2.2 Bagan Struktur Organisasi Kelurahan



Sumber :Bagan Struktur Organisasi Kecamatan Pondokmelati, diolah

Adapun Kelurahan di Kecamatan Pondokmelati adalah :

1. Kelurahan Jatimurni;
2. Kelurahan Jatiwarna;
3. Kelurahan Jatimelati;
4. Kelurahan Jatimurni.

2.1.2 SUMBER DAYA KECAMATAN PONDOKMELATI

Kecamatan Pondokmelati merupakan salah satu kecamatan di Kota Bekasi yang memiliki beragam sumber daya, baik dari aspek manusia, infrastruktur, maupun potensi ekonomi. Dengan luas wilayah sekitar 1.179,925 Ha (11,48 km²), kecamatan ini terdiri dari empat

Paraf Koordinasi	
Camat Pondokmelati	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	



kelurahan, yaitu Jatimelati, Jatirahayu, Jatimurni dan Jatiwarna, yang masing-masing memiliki karakteristik dan potensi tersendiri.

1. Sumber Daya Manusia

Pondokmelati memiliki jumlah penduduk yang terus berkembang dengan komposisi demografi yang beragam. Sebagian besar penduduknya bekerja di sektor perdagangan, jasa dan industri, serta terdapat pula kelompok masyarakat yang bergerak di bidang usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Tingkat pendidikan masyarakat juga cukup baik, didukung oleh keberadaan berbagai lembaga pendidikan dari tingkat dasar hingga menengah atas, serta pusat pelatihan keterampilan.

2. Infrastruktur dan Fasilitas Publik

Sebagai bagian dari Kota Bekasi, Pondokmelati memiliki infrastruktur yang terus berkembang. Beberapa sumber daya infrastruktur utama meliputi:

- **Jalan dan Transportasi:** Tersedianya akses jalan utama dan jalan lingkungan yang menghubungkan berbagai wilayah dalam kecamatan serta ke daerah sekitar seperti Daerah Khusus Jakarta.
- **Fasilitas Pendidikan:** Terdapat sekolah negeri dan swasta, serta madrasah yang mendukung kebutuhan pendidikan masyarakat.
- **Kesehatan:** Keberadaan puskesmas, klinik dan rumah sakit terdekat memberikan akses layanan kesehatan yang memadai.
- **Sarana Ibadah:** Tersedia masjid, mushola, serta tempat ibadah lain yang mendukung kehidupan sosial dan spiritual masyarakat.
- **Fasilitas Sosial dan Ekonomi:** Pasar tradisional, minimarket, serta pusat perbelanjaan mendukung aktivitas ekonomi warga.

3. Potensi Ekonomi dan Sumber Daya Alam

Kecamatan Pondokmelati memiliki sektor ekonomi yang berkembang dengan didominasi oleh perdagangan dan jasa. Keberadaan UMKM menjadi salah satu kekuatan ekonomi yang dapat terus dikembangkan melalui program pemberdayaan masyarakat dan kemitraan dengan berbagai pihak. Selain itu, Pondokmelati masih memiliki beberapa kawasan hijau dan lahan terbuka yang berpotensi dikembangkan untuk ruang hijau, pertanian urban, serta kegiatan berbasis lingkungan.

Paraf Koordinasi	
Camat Pondokmelati	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	



4. Sumber Daya Sosial dan Budaya

Masyarakat Pondokmelati memiliki kehidupan sosial yang harmonis dengan adanya berbagai organisasi masyarakat (Ormas) dan kelompok masyarakat (Pokmas) yang aktif dalam berbagai bidang, seperti sosial, keagamaan, dan kemasyarakatan. Kegiatan budaya dan tradisi lokal juga masih dijaga dan dilestarikan sebagai bagian dari identitas masyarakat. Dalam rangka mewujudkan tujuan organisasi yaitu pelayanan masyarakat yang prima serta menjalankan tugas pokok dan fungsi yang efektif dan efisien sebagai perangkat daerah, perlu didukung oleh sumber daya manusia yang baik dan memiliki kemampuan dalam pelaksanaan tugas. Penyusunan arah dan kebijakan pada umumnya menggunakan sejumlah asumsi dan untuk mencapainya sering dijumpai berbagai permasalahan, kendala dan tantangan karena keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang sesuai dengan tuntutan ketugasan di level kecamatan maupun kelurahan, baik dari sisi kemampuan maupun motivasi kerja.

Pemerintah Kecamatan Pondokmelati didukung unit kerja sebanyak 4 (empat) Kelurahan. oleh sebanyak 140 orang pegawai, terdiri dari 44 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS), 96 orang Tenaga Kerja Kontrak (TKK), SDM Kecamatan Pondokmelati terdiri dari:

Tabel 2.1 Jumlah pegawai kecamatan pondokmelati berdasarkan Jabatan

No.	Jabatan	Jumlah	Keterangan
1.	Camat	1	Orang
2.	Sekretaris Kecamatan	1	Orang
3.	Lurah	4	Orang
4.	Kepala Seksi Kecamatan	5	Orang
5.	Sekretaris Kelurahan	4	Orang
6.	Kepala Seksi Kelurahan	12	Orang
7.	Kepala Sub Bagian	2	Orang
8.	Staff Pelaksana	15	Orang
	Jumlah	44	Orang

Sumber : Kepegawaian Kecamatan Pondokmelati Tahun 2025, diolah

Paraf Koordinasi	
Camat Pondokmelati	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	



Tabel 2.2 Data Pendidikan Pegawai Kecamatan Pondokmelati

SDM	Jumlah	Pendidikan Terakhir					
		S3	S2	S1	D3/D4	SMA	SMP
Pejabat struktural	29	-	6	22	1	-	-
PNS	15	-	-	5	2	6	2
PPPK	79	-	-	24	8	47	-
Tenaga Kontrak Kerja (TKK)	17	-	-	4	2	11	-
Jumlah	133	-					-

Sumber : Kepegawaian Kecamatan Pondokmelati Tahun 2025, diolah

Tabel 2.3 Kondisi Kepegawaian berdasarkan Pangkat dan Golongan

No.	Pangkat	Golongan	Jumlah	Keterangan
1.	Pembina Tk.I	IV/b	1	Orang
2.	Pembina	IV/a	3	Orang
3.	Penata Tk.I	III/d	18	Orang
4.	Penata	III/c	5	Orang
5.	Penata Muda Tk. 1	III/b	3	Orang
6.	Penata Muda	III/a	4	Orang
7.	Pengatur Tk.I	II/d	5	Orang
8.	Pengatur	II/c	1	Orang
9.	Pengatur Muda Tk.I	II/b	1	Orang
10.	Pengatur Muda	II/a	1	Orang
11.	P3K	-	79	Orang

Sumber : Kepegawaian Kecamatan Pondokmelati Tahun 2025, diolah

Berdasar tabel tersebut bahwa sumber daya manusia di Kecamatan Pondokmelati telah sebagian memenuhi kompetensi dalam pelayanan kepada warga masyarakat.

Dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat, maka di kecamatan dan kelurahan telah dilengkapi dengan gedung-gedung kantor dan juga sarana pendukung kelancaran pelayanan maupun penunjang kegiatan administrasi perkantoran (perangkat keras dan lunak), sehingga sangat membantu dalam menunjang pelaksanaan kegiatan baik untuk kebutuhan administrasi perkantoran maupun

Paraf Koordinasi	
Camat Pondokmelati	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

*Rancangan Awal
Rencana Strategis Kecamatan Pondokmelati
Tahun 2024 - 2026*



pelayanan kepada masyarakat. Berikut ini kami sampaikan barang-barang inventaris yang sangat berpengaruh dalam mendukung pelaksanaan tugas Instansi Kecamatan Pondokmelati.

Tabel 2.4 Data Sarana dan Prasarana Kecamatan Pondokmelati

No	Jenis/Nama Barang	Kecamatan	Kelurahan	Kondisi		Jumlah
				Baik	Rusak	
1.	Gedung Kantor	2 Unit	4 Unit	6		6 Unit
2.	Musholah	1 Unit	4 Unit	5		5 Unit
3.	Rumah Dinas	-	-	-	-	-
4.	Kendaraan Roda 4	4 Unit	8 Unit	12	-	12 Unit
5.	Kendaraan Roda 2	6 Unit	8 Unit	14	-	14 Unit
6.	Sepeda ontel	-	-	-	-	-
7.	Komputer Administrasi	22 Unit	22 Unit	√		44 Unit
8.	Komputer SIAK	5 Unit	-	√		-
9.	Printer	12 Unit	8 Unit	√		36 Unit
10.	Mesin Ketik	1 Unit	4 Unit	√		5 Unit
11.	Televisi	3 Unit	8 Unit	√		11 Unit
12.	Wirreless	4 Unit	4 Unit	√		4 Unit
13.	Air Conditioner	12 Unit	16 Unit	23	5	23 Unit
14.	Amplifier	1 Unit	4 Unit	√	√	5 Unit
15.	Hom TOA	-	-	-	-	-
16.	Pesawat Telepon	1 Unit	4 Unit	√	√	1 Unit
17.	Faximile	1 Unit	-	-	√	1 Unit
18.	Brankas	-	-	-	-	-
19.	Filling Kabinet	7 Unit	16 Unit	√		23 Unit
20.	Almari Kayu	3 Unit	12 Unit	√		14 Unit
21.	Almari Kaca	1 Unit	4 Unit	√		5 Unit
22.	Almari Arsip	5 Unit	4 Unit	√		5 Unit
23.	Meja Kerja	25 Unit	22 Unit	√		47 Unit
24.	Meja Rapat	2 Unit	4 Unit	√		6 Unit
25.	Meja Komputer	22 Unit	16 Unit	√		38 Unit
26.	Kursi Kerja	25 Unit	22 Unit	√		47 Unit
27.	Kursi Lipat	10 Unit	40 Unit	√		50 Unit
28.	Kursi Rapat Lipat	-	-	-	-	-
29.	Dispenser	4 Unit	4 Unit	6	2	8 Unit
30.	Kamera Digital	-	-			-
31.	Laptop	3 Unit	8 Unit	√		11 Unit
32.	Kipas Angin	4 Unit	4 Unit	√		8 Unit
33.	Pesawat Telepon	1 Unit	1 Unit	√		2 Unit
34.	Genset	-	4 Unit	√		5 Unit
35.	Mesin Presensi	1 Unit	4 Unit	√		5 Unit
36.	Kendaraan Roda 3	1 Unit	4 Unit	-	5	5 Unit
37.	Proyektor	1 Unit	-	√		1 Unit

Sumber : Dokumen Pengelola Barang Milik Daerah Kecamatan Pondokmelati Tahun 2025, diolah

Paraf Koordinasi	
Camat Pondokmelati	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	



2.1.3. KINERJA PELAYANAN PADA KECAMATAN PONDOKMELATI

Kecamatan Pondokmelati terus berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi pemerintahan yang efisien, efektif, dan akuntabel. Kinerja pelayanan publik menjadi salah satu indikator utama dalam mengukur keberhasilan tata kelola pemerintahan di tingkat kecamatan.

Dalam upaya memenuhi harapan masyarakat, Kecamatan Pondokmelati secara konsisten melakukan pembenahan terhadap sistem pelayanan, baik dari sisi prosedur, penyelesaian waktu, maupun kemudahan akses. Penerapan prinsip-prinsip pelayanan publik yang transparan, partisipatif, dan berorientasi pada hasil telah menjadi landasan dalam setiap aspek pelayanan.

Selain itu, Kecamatan Pondokmelati juga secara aktif mendorong inovasi pelayanan berbasis teknologi informasi, seperti pemanfaatan aplikasi digital, pelayanan data integrasi, serta penyediaan saluran komunikasi dua arah antara masyarakat dan pemerintah. Hal ini bertujuan untuk menciptakan pelayanan yang lebih cepat, tepat, dan responsif terhadap kebutuhan warga.

Kinerja Kecamatan Pondokmelati diukur berdasarkan Tingkat Pencapaian Sasaran. Pencapaian Sasaran diperoleh dengan cara membandingkan Target dengan Realisasi Indikator Sasaran.

Tabel 2.5 Capaian Kinerja Pelayanan Tahun 2020 – 2024

NO	Indikator Kinerja Sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra OPD Tahun ke-				Realisasi Capaian Tahun ke-				Rasio Capaian pada Tahun ke-			
					2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
1	Nilai AKIP Kecamatan Pondokmelati				75	76,5	77		75,09	75,09	75,1		100,0%	98,09%	97,59%	
2	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik				81	82	83		87,66	83,51	95,2		108%	101,8%		
3	Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan di Kecamatan Pondokmelati				60	60	60%		60	68,8	60%		100%	114,5%	100%	
4	Persentase Peningkatan Wilayah Yang Tertib				58%	60%	65%		58%	60%	65%		100%	100%	100%	
5	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik							81				84,94				104,87%
6	Nilai Auntbilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)							75				75,1				100,19%
7	Persentase Peningkatan Wilayah Yang Tertib							60%				60%				100%

Sumber : Dokumen LAKIP Tahun 2020-Tahun 2024, diolah

Penjelasan dari table diatas, selama kurun waktu empat tahun terakhir, yakni dari tahun 2021 hingga 2024,

Kecamatan Pondokmelati	
Paraf Koordinasi	
Camat Pondokmelati	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

*Rancangan Awal
Rencana Strategis Kecamatan Pondokmelati
Tahun 2024 - 2026*



menunjukkan kinerja yang cukup stabil dan cenderung meningkat dalam berbagai aspek pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan. Namun demikian, adanya perubahan RPJMD pada Tahun 2021 dan berakhirnya periode Renstra Tahun 2018–2023 memberikan implikasi terhadap arah kebijakan dan program yang dilaksanakan oleh perangkat daerah, termasuk kecamatan. Perubahan tersebut menuntut penyesuaian terhadap sasaran, indikator kinerja, serta program dan kegiatan yang menjadi prioritas pembangunan. Oleh karena itu, kecamatan perlu melakukan penyesuaian dokumen perencanaan, termasuk dalam penyusunan rencana kerja tahunan yang selaras dengan dokumen perencanaan daerah yang baru. Berdasarkan indikator-indikator kinerja yang telah ditetapkan, mayoritas capaian berhasil memenuhi bahkan melampaui target yang direncanakan. Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) misalnya, mengalami lonjakan hingga 125% pada tahun 2020, menunjukkan adanya optimalisasi peran kecamatan dalam melaksanakan fungsinya. Hal ini juga didukung oleh peningkatan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap layanan publik yang mencapai angka tertinggi 114,66% pada tahun 2023.

Capaian indikator lainnya seperti persentase zonasi wilayah tertib, bersih, dan indah, serta peningkatan wilayah yang tertib juga menunjukkan konsistensi capaian sebesar 100% setiap tahunnya. Indikator pemberdayaan masyarakat pun memperlihatkan tren yang baik, dengan capaian tertinggi pada tahun 2021 sebesar 114,58%, mencerminkan keberhasilan program partisipatif yang dijalankan pemerintah kecamatan bersama masyarakat. Sementara itu, capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) cenderung stabil meskipun sedikit menurun pada tahun 2024 menjadi 97,59%, sehingga menjadi satu-satunya indikator yang perlu mendapatkan perhatian dan perbaikan ke depan. Data menunjukkan bahwa Kecamatan Pondokmelati telah berhasil menjaga kinerja pelayanan publik dan pembangunan wilayah secara konsisten dan terukur. Dengan tetap mempertahankan indikator yang sudah kuat dan melakukan perbaikan pada aspek akuntabilitas, Kecamatan Pondokmelati berpotensi menjadi contoh penerapan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan responsif di tingkat wilayah.

Paraf Koordinasi	
Camat Pondokmelati	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	



Secara keseluruhan, evaluasi ini menunjukkan bahwa perangkat daerah telah berhasil mencapai target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan strategis. Keberhasilan ini menjadi indikasi bahwa tata kelola pemerintahan yang adaptif dan inovatif terus dikembangkan, dengan peningkatan pelayanan publik dan sistem akuntabilitas yang lebih baik.

2.1.4 KELOMPOK SASARAN LAYANAN

Dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 tahun 2003 tentang penyelenggaraan pelayanan publik, dinyatakan bahwa pelayanan publik mengandung sendi-sendi:

- a. Kesederhanaan pelayanan meliputi prosedur yang mudah, cepat, dan mudah dilaksanakan;
- b. Kejelasan persyaratan teknis dan administrasi pelayanan public;
- c. Kepastian waktu Artinya pelayanan publik dapat dilaksanakan dalam waktu yang telah ditetapkan sebelumnya sesuai dengan SOP (Standar Operasional Prosedur) yang berlaku;
- d. Akurasi yang berarti bahwa produk pelayanan publik diterima dengan benar, tepat dan sah;
- e. Keamanan pada proses dan produk pelayanan publik memberikan rasa aman dan kepastian hukum;
- f. Tanggung jawab penyelenggara pelayanan publik atau pegawai yang ditunjuk, bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelayanan dan penyelesaian keluhan, persoalan dalam pelaksanaan pelayanan publik;
- g. Kenyamanan lingkungan pelayanan yang harus tertib, nyaman, bersih, rapi, lingkungan yang indah dan sehat serta dilengkapi dengan fasilitas pendukung pelayanan.

Dari penjelasan diatas, bahwa kelompok sasaran pelayanan pada Kecamatan Pondokmelati Kota Bekasi adalah warga Masyarakat di Kecamatan Pondokmelati Kota Bekasi itu sendiri. Pelayanan publik dapat dikatakan berkualitas jika pelayanan yang diberikan kepada masyarakat mendapat pengakuan dari pihak-pihak yang dilayani. Hal ini dapat diketahui dengan cara membandingkan persepsi masyarakat melalui kegiatan Survey Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Pondokmelati. Pada proses terselenggarannya pelayanan kepada publik, Kecamatan

Paraf Koordinasi	
Camat Pondokmelati	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	



Pondokmelati terdapat beberapa unsur yang berperan dalam hal dimaksud, diantaranya Babinsa dari Koramil Pondokgede, Bimaspol dari Polsek Pondokgede, UPP Pendidikan dari Dinas Pendidikan Kota Bekasi, UPTD Pendapatan, UPTD LH, UPTD Parkir dan Restribusi. Sedangkan Kerjasama dalam peningkatan pembangunan Kecamatan Pondokmelati didukung oleh DBMSDA Kota Bekasi dan Diperkimtan Kota Bekasi.

2.1.5 MITRA PERANGKAT DAERAH DALAM PEMBERIAN PELAYANAN

Dalam penyelenggaraan pelayanan publik, Kecamatan Pondokmelati berkoordinasi dengan berbagai mitra perangkat daerah, termasuk Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Bekasi, kelurahan, serta lembaga masyarakat seperti LPMK, Karang Taruna, dan Forum Komunikasi Kecamatan (FKK), untuk memastikan pelayanan yang efektif dan responsif. Kolaborasi ini mencakup bidang administrasi kependudukan, pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, dan penanganan masalah sosial, dengan mengacu pada kebijakan Pemkot Bekasi serta melibatkan partisipasi aktif warga melalui forum Musrenbang. Sinergi ini memperkuat tata kelola pemerintahan di tingkat kecamatan sekaligus mendukung percepatan pencapaian target pembangunan daerah. Untuk mendukung kelancaran dan efektivitas pelayanan publik di tingkat kecamatan, Kecamatan Pondokmelati melakukan koordinasi teknis dan operasional dengan perangkat daerah terkait, yaitu:

1. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil):

- Pelaksanaan layanan perekaman dan pencetakan KTP-el melalui mobil layanan keliling atau pelayanan jemput bola.
- Fasilitasi pengurusan dokumen kependudukan seperti Kartu Keluarga, akta kelahiran, dan akta kematian.
- Penguatan data kependudukan sebagai dasar validasi dalam pelayanan lainnya.

2. Badan Pendapatan Daerah (Bapenda):

- Penyelenggaraan pelayanan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) melalui loket pelayanan terpadu atau giat layanan keliling.
- Sosialisasi dan edukasi perpajakan daerah kepada masyarakat, khususnya dalam masa jatuh tempo pembayaran.

Paraf Koordinasi	
Camat Pondokmelati	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	



- Sinkronisasi data objek pajak dengan data kependudukan untuk validasi dan pemutakhiran database.

3. Dinas Pendidikan (Disdik):

- Koordinasi dalam penerbitan Surat Keterangan Domisili (SKD) untuk persyaratan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).
- Pendataan anak usia sekolah yang tidak/belum terdaftar sebagai peserta didik untuk intervensi program pendidikan.
- Dukungan terhadap program kejar paket dan pendidikan inklusif di wilayah kecamatan.

4. Dinas Kesehatan (Dinkes):

- Pelaksanaan kegiatan Posyandu, imunisasi, dan penyuluhan kesehatan masyarakat bekerja sama dengan Puskesmas.
- Penanganan kasus penyakit menular (DBD, TBC, COVID-19) melalui pelaporan dan koordinasi lintas sektor.
- Program penjangkaran kesehatan dan pemeriksaan berkala terhadap kelompok rentan (balita, lansia, ibu hamil).

5. Dinas Perhubungan (Dishub)

6. Dinas Lingkungan Hidup (Dis. LH)

7. DPMPSTP

8. DBMSDA

9. DISPERKIMTAN

10. Satuan Polisi Pamong Praja

Koordinasi dengan Unit-unit perangkat daerah ini dilakukan secara rutin melalui forum lintas sektor, rapat teknis, dan pelaporan berbasis aplikasi atau sistem informasi yang tersedia. Model kerja kolaboratif ini mendukung percepatan pelayanan, efisiensi waktu, serta peningkatan kualitas intervensi kebijakan di tingkat kecamatan.

2.1.6 DUKUNGAN BUMD DALAM RANGKA PENCAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH

BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) sebenarnya dibentuk oleh Pemerintah Provinsi atau Kabupaten/Kota, bukan kecamatan. Jadi, tidak ada BUMD yang langsung berada dalam lingkup kewenangan kecamatan. Namun, BUMD dapat beroperasi atau memiliki cabang/unit layanan di wilayah kecamatan. Berikut beberapa contoh BUMD Kota

Paraf Koordinasi	
Camat Pondokmelati	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	



Bekasi yang mungkin memiliki unit layanan atau pengaruh di lingkup Kecamatan Pondokmelati :

BUMD Kota Bekasi yang Relevan di Lingkup Kecamatan:

1. Perumda Tirta Bhagasasi Bekasi

- o Jenis : BUMD Air Minum
- o Peran di kecamatan: Pelayanan air bersih untuk rumah tangga dan pelaku usaha.

2. PD Mitra Patriot

- o Jenis : Jasa konstruksi, pengelolaan parkir, kebersihan, dan lingkungan
- o Peran di kecamatan: Bisa terlibat dalam pengelolaan parkir atau kebersihan di fasilitas umum tingkat kecamatan, meskipun pelaksanaannya tetap di bawah koordinasi kota.

3. Bank BJB (Bank Jabar Banten) – meskipun ini BUMD provinsi, namun:

- o Peran di kecamatan: Biasanya menjadi mitra pembayaran PBB, gaji ASN, dan layanan keuangan lainnya di kecamatan.

4. PD BPRS Patriot Bekasi

- o BPRS Patriot Bekasi dengan bidang usaha perbankan syariah ini memiliki ruang lingkup usaha yaitu: menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan; memberikan bantuan pembiayaan dan melakukan pembinaan khususnya terhadap para pengusaha mikro atau kecil; melakukan penyaluran dana; melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan BPRS Patriot Bekasi; memberikan jasa lainnya yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan mengelola kegiatan dana sosial berupa zakat, infaq dan shodaqoh (ZIS dan wakaf tunai).

Sebagai catatan penting, Kecamatan tidak membentuk atau mengelola BUMD, namun berkoordinasi dengan BUMD dalam penyelenggaraan layanan publik. Keberadaan unit pelayanan BUMD di kecamatan (seperti kantor PDAM atau loket pembayaran PBB) bersifat penugasan operasional, bukan struktural.

2.1.7 KERJA SAMA DAERAH YANG MENJADI TANGGUNG JAWAB PERANGKAT DAERAH

Paraf Koordinasi	
Camat Pondokmelati	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	



Meskipun secara struktural kecamatan bukanlah perangkat daerah otonom yang memiliki kewenangan penuh untuk menyelenggarakan kerja sama daerah, namun dalam praktiknya kecamatan dapat berperan sebagai pelaksana teknis, fasilitator, atau koordinator wilayah dalam mendukung kerja sama lintas sektor. Hal ini sesuai dengan kedudukan kecamatan sebagai perangkat daerah yang membantu wali kota atau bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum, pelayanan publik, dan koordinasi lintas wilayah. Kecamatan dapat terlibat dalam pelaksanaan kerja sama antarinstansi, seperti kegiatan pelayanan terpadu dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, kerja sama donor darah bersama PMI, ataupun koordinasi lintas kecamatan dalam penanganan kebencanaan dan ketertiban umum. Kegiatan-kegiatan tersebut merupakan bentuk kolaborasi yang tidak berbentuk kerja sama formal antar daerah, namun dijalankan atas dasar kebutuhan pelayanan masyarakat yang lintas wilayah.

Selain itu, kecamatan juga dapat memfasilitasi kerja sama antara unit kelurahan dengan BUMD, BUMDesa, ataupun lembaga swadaya masyarakat dalam rangka pemberdayaan ekonomi lokal atau peningkatan kualitas pelayanan publik. Namun demikian, kecamatan tidak memiliki kewenangan untuk menandatangani nota kesepahaman (MoU) atau perjanjian kerja sama antar daerah secara formal, karena kewenangan tersebut berada di tingkat kepala daerah atau perangkat daerah yang memiliki kedudukan sebagai SKPD. Dengan demikian, meskipun kecamatan bukan pengambil keputusan utama dalam kerja sama daerah, keberadaannya sangat penting sebagai ujung tombak pelaksanaan teknis di lapangan, yang menjembatani kepentingan antar instansi, wilayah, dan masyarakat.

2.2 PERMASALAHANN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.2.1 PERMASALAHAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Rumusan permasalahan merupakan pernyataan kondisi nyata (realita) yang muncul sebagai akibat dari adanya kesenjangan antara capaian pembangunan saat ini dengan kondisi ideal yang diharapkan. Dalam konteks Kecamatan Pondokmelati, rumusan permasalahan ini disusun berdasarkan hasil analisis deskriptif dan diagnosis yang telah diuraikan pada Bab II, dengan memperhatikan aspek pelayanan publik, infrastruktur, kesejahteraan masyarakat, serta tata kelola pemerintahan.

Paralel Koordinasi	
Camat Pondokmelati	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	



Beberapa permasalahan utama yang berhasil diidentifikasi antara lain sebagai berikut:

1. Masih terbatasnya cakupan pelayanan administrasi kependudukan secara digital, yang belum sepenuhnya menjangkau seluruh lapisan masyarakat, terutama lansia dan warga dengan keterbatasan akses teknologi.
2. Kondisi infrastruktur jalan lingkungan dan drainase yang belum merata kualitasnya, mengakibatkan rawan banjir di beberapa titik permukiman saat musim hujan.
3. Belum optimalnya kolaborasi antar lembaga pelayanan dasar, seperti Dinas Kesehatan, Disdik, dan Disdukcapil, dalam penyediaan layanan terintegrasi di tingkat kecamatan.
4. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang masih perlu ditingkatkan, terutama dalam mekanisme musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) di tingkat RW dan kelurahan.
5. Kesenjangan antara kebutuhan pelayanan dasar dengan kapasitas SDM dan sarana pendukung di tingkat kelurahan, yang berdampak pada keterbatasan responsivitas terhadap permasalahan masyarakat.

Beberapa faktor berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di Kecamatan Pondokmelati. Dengan menggunakan analisis lingkungan strategis (Analisis SWOT/Strength, Weakness, Opportunity and Threat). Dengan hasil pada masing- masing analisis sebagai berikut:

Kekuatan (Strength):

Kecamatan Pondokmelati memiliki kekuatan pada letaknya yang strategis di perbatasan dengan DKI Jakarta, sehingga berperan sebagai pintu gerbang aktivitas masyarakat antara Kota Bekasi dan Ibukota. Kondisi wilayah yang relatif masih memiliki ruang terbuka dibandingkan kawasan kota mendukung terciptanya lingkungan yang lebih asri dan nyaman, sekaligus memberikan potensi pengembangan permukiman serta pelayanan publik yang lebih terjangkau.

Kelemahan (Weakness):

Kelemahan yang dihadapi Kecamatan Pondokmelati adalah keterbatasan aksesibilitas transportasi massal, karena belum terhubung dengan jaringan kereta commuter line, serta tidak adanya kawasan industri dan komersial besar yang dapat menjadi penggerak utama perekonomian lokal. Hal ini

Paraf Koordinasi	
Camat Pondokmelati	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	



menyebabkan masyarakat sangat bergantung pada wilayah sekitar untuk bekerja maupun memenuhi kebutuhan layanan ekonomi berskala besar.

Peluang (*Opportunity*):

Pondokmelati memiliki peluang untuk mengembangkan diri sebagai kawasan pemukiman yang nyaman dengan fasilitas sosial, budaya, dan pelayanan publik yang semakin baik, mengingat posisinya dekat dengan Jakarta. Peningkatan pembangunan infrastruktur perkotaan, seperti jalan, transportasi umum, serta digitalisasi pelayanan publik, dapat membuka peluang menarik investasi kecil dan menengah yang sesuai dengan karakter wilayah pemukiman.

Ancaman (*Threat*):

Ancaman yang dapat muncul adalah meningkatnya arus urbanisasi dari Jakarta dan wilayah sekitarnya yang berpotensi menimbulkan kepadatan penduduk, tekanan terhadap ruang terbuka hijau, serta meningkatnya kebutuhan layanan dasar. Selain itu, ketergantungan terhadap pusat ekonomi di luar wilayah Pondokmelati dapat memperlemah kemandirian ekonomi lokal jika tidak diantisipasi melalui perencanaan pembangunan yang adaptif.

Permasalahan-permasalahan tersebut akan menjadi dasar dalam penyusunan strategi, arah kebijakan serta program dan kegiatan Kecamatan Pondokmelati ke depan, agar selaras dengan visi pembangunan daerah serta mendukung pencapaian tujuan RPJMD Kota Bekasi.

2.2.2 Telahaan RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025-2029

Dalam rangka mewujudkan pembangunan daerah yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan, penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi Tahun 2025–2029 menjadi langkah strategis yang sangat penting. Renstra Kecamatan Pondokmelati Tahun 2025-2029 ini merupakan penjabaran visi, misi, dan program Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi ke dalam bentuk arah kebijakan dan strategi pembangunan daerah selama

Paraf Koordinasi	
Camat Pondokmelati	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	



lima tahun ke depan. Telaahan terhadap RPJMD ini disusun sebagai bagian dari proses perencanaan yang komprehensif, yang bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh tahapan dan substansi perencanaan telah memenuhi prinsip-prinsip perencanaan pembangunan yang partisipatif, terukur, dan berbasis pada data serta kondisi riil daerah. Melalui telaahan ini, diharapkan dapat diidentifikasi berbagai isu strategis, potensi unggulan, serta tantangan yang dihadapi Kota Bekasi, guna menjadi landasan dalam merumuskan prioritas pembangunan yang lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

2.2.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi Jawa Barat

Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Pondokmelati memperhatikan dan mengacu pada dokumen Rencana Strategis Kelembagaan dan Rencana Strategis Provinsi Jawa Barat agar tercipta keterpaduan penyusunan Rencana Strategis yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

2.2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Pondokmelati

Dari sisi tantangan, pelayanan Kecamatan Pondokmelati dihadapkan pada karakter wilayah perbatasan dengan DKI Jakarta yang memicu mobilitas penduduk tinggi, arus kepentingan lintas-batas, dan kompleksitas koordinasi kelembagaan. Keterbatasan akses transportasi massal (belum terhubung commuter line) berdampak pada keterjangkauan warga terhadap layanan tatap muka, sekaligus menuntut penjadwalan dan pemerataan layanan yang lebih cermat hingga tingkat kelurahan/RT–RW. Di sisi internal, masih ditemukan kebutuhan peningkatan kapasitas SDM frontliner, standarisasi SOP lintas loket, pemutakhiran data dasar kependudukan secara berkala, serta perbaikan sistem pengelolaan pengaduan yang responsif dan terintegrasi. Keterbatasan ruang publik dan tekanan terhadap lingkungan organisasi (drainase, sampah, RTH) juga menambah beban layanan, sementara disiplin

Paraf Koordinasi	
Camat Pondokmelati	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	



anggaran menuntut prioritas program yang benar-benar bernilai manfaat dan mengukur hasilnya.

Di sisi peluang, kedekatan geografis dengan Jakarta membuka kesempatan kolaborasi layanan lintas-batas (diseminasi informasi, referensi layanan, dan kemitraan CSR) serta pengembangan ekosistem UMKM-jasa berbasis organisasi yang dapat ditopang oleh kemudahan perizinan dan pendampingan usaha. Digitalisasi menjadi pengungkit utama—melalui perluasan kanal layanan dare (formulir, antrean, konsultasi), integrasi aplikasi kota/kelurahan, dan pemanfaatan dashboard kinerja real-time untuk menyatukan waktu layanan, cakupan, kepuasan, serta penyelesaian aduan. Inovasi jemput-bola (gerai keliling ke RW/sekolah/rumah ibadah), kemitraan komunitas (PKK, Karang Pelayanan Taruna, LPM), serta program edukasi literasi administrasi di lingkungan warga dapat memperpendek jarak layanan dan meningkatkan kepatuhan dokumen kependudukan. Dengan tata kelola yang adaptif-inovatif, standardisasi SOP berbasis SPBE/SAKIP, dan pengarusutamaan kelompok rentan (disabilitas, lansia, ibu-anak), Kecamatan Pondokmelati berpeluang meningkatkan saling layanan secara merata meski tanpa dukungan kawasan industri/komersial besar maupun jaringan KRL.

2.2.5 Isu Strategis Kecamatan Pomdokmelati

Berdasarkan permasalahan, isu sesuai konteks dan dengan memperhatikan potensi daerah, maka rumusan isu strategis Kecamatan Pondokmelati Kota Bekasi untuk 5 tahun ke depan adalah seperti pada gambar di bawah ini.

- **Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan publik yang prima dan responsive**

Masih ditemui kesenjangan dalam hal akses dan mutu pelayanan administrasi kependudukan, perizinan, dan pelayanan umum lainnya yang membutuhkan inovasi pelayanan berbasis digital serta pendekatan jemput bola.

Paraf Koordinasi	
Camat Pondokmelati	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	



- **Penguatan koordinasi lintas sektor dan optimalisasi peran kecamatan sebagai simpul integrasi pelayanan**

Terdapat kebutuhan untuk memperkuat peran kecamatan dalam menjembatani kerja sama teknis antara OPD dan instansi vertikal dalam rangka menyinergikan layanan dasar kepada masyarakat.

- **Peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan wilayah**

Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pembangunan, pengawasan lingkungan, dan kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan masih perlu ditingkatkan melalui pendekatan edukatif dan kolaboratif.

- **Pengembangan sumber daya manusia dan kelembagaan di tingkat kelurahan**

Masih diperlukan peningkatan kapasitas aparatur dan kelembagaan kelurahan dalam hal tata kelola administrasi, perencanaan partisipatif, serta pemanfaatan teknologi informasi.

- **Peningkatan ketahanan sosial dan pelayanan kesehatan masyarakat berbasis wilayah**

Terdapat kebutuhan untuk memperluas cakupan layanan kesehatan dasar, penguatan ketahanan keluarga, serta dukungan terhadap kelompok rentan dan penyandang disabilitas di lingkungan masyarakat.

Tabel 2.6 Isu Strategis Kecamatan Pondokmelati

No	Potensi Daerah	Permasalahan	Isu KLHS	Global	Nasional	Regional	Isu Strategis
1	Pelayanan administrasi	Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan publik yang prima dan responsif	Akses layanan dasar	Dampak Perubahan Iklim Global	Krisis Lingkungan	Layanan Infrastruktur Dasar	Integrasi Wilayah Regional dan Penataan Kota Berkelanjutan
2	Koordinasi lintas sektor	Penguatan koordinasi lintas sektor dan optimalisasi peran kecamatan sebagai simpul integrasi pelayanan	Menguatkan sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan (TPB 17).				

Paraf Koordinasi	
Camat Pondokmelati	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

*Rancangan Awal
Rencana Strategis Kecamatan Pondokmelati
Tahun 2024 - 2026*



No	Potensi Daerah	Permasalahan	Isu KLHS	Global	Nasional	Regional	Isu Strategis
3	Partisipasi masyarakat	Peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan wilayah	Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi (TPB 9);				
4	SDM aparatur	Pengembangan sumber daya manusia dan kelembagaan di tingkat kelurahan	Inklusivitas pembangunan				
5	Layanan kesehatan dasar	Peningkatan ketahanan sosial dan pelayanan kesehatan masyarakat berbasis wilayah	Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk usia (TPB 3)				

Sumber : Dokumen RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025-2029, diolah

Paraf Koordinasi	
Camat Pondokmelati	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	



BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Pondokmelati Tahun 2025-2029

Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Pondokmelati Tahun 2025-2029 penentuannya didasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2030 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029, serta RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025-2029 yang relevan dengan tugas dan fungsi Kecamatan.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2030 merupakan dokumen perencanaan nasional yang menjadi pedoman penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga serta Rencana Pembangunan Daerah. OPD Kecamatan sebagai bagian dari perangkat daerah berkewajiban menjabarkan arah kebijakan nasional ke dalam program, kegiatan, dan subkegiatan yang relevan dengan kewenangannya. RPJMN 2025-2030 mengusung Visi “Indonesia Emas 2045: Negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan”. Telaahan terhadap tujuan dan sasaran nasional yang relevan untuk Kecamatan dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

Gambar 3.1 Telaahan RPJMN 2025-2030 untuk OPD Kecamatan

Fokus Utama RPJMN 2025-2030	Relevansi Untuk Kecamatan	Dukungan OPD Kecamatan
Transisi Energi dan Lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> • Pengelolaan sampah berbasis masyarakat. • Edukasi lingkungan hidup di tingkat lokal. 	<ul style="list-style-type: none"> • Program bank sampah, kompos, dan kampung hijau. • Sosialisasi dan edukasi lingkungan ke sekolah dan kelompok masyarakat
Transformasi sosial	<ul style="list-style-type: none"> • Penurunan angka kemiskinan ekstrem • Akses pelayanan dasar: pendidikan, kesehatan, dan administrasi kependudukan. • Penguatan layanan pemberdayaan masyarakat dan keluarga. 	<ul style="list-style-type: none"> • Fasilitasi program bantuan sosial. • Pelayanan administrasi kependudukan tingkat kelurahan. • Koordinasi posyandu dan posbindu • Kegiatan pemberdayaan RT/RW, PKK, dan Karang Taruna.
Transformasi Ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> • Pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis kewilayahan • Pengembangan UMKM lokal dan ekonomi digital mikro. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pembinaan UMKM melalui forum kewirausahaan kecamatan • Promosi produk lokal dan pasar murah. • Kolaborasi dengan dinas teknis untuk pelatihan dan pendampingan usaha.
Transformasi Tata Kelola	<ul style="list-style-type: none"> • Penguatan kapasitas dan reformasi birokrasi kecamatan. • Digitalisasi layanan publik. 	<ul style="list-style-type: none"> • Implementasi e-office, pelaporan digital, dan pelayanan terpadu • Penyederhanaan SOP dan pelayanan yang berbasis pada kepuasan warga. • Peningkatan kapasitas aparatur kecamatan.
Pembangunan Wilayah	<ul style="list-style-type: none"> • Penanggulangan daerah kumuh. • Infrastruktur dasar (jalan lingkungan, drainase, penerangan) • Tata kelola ruang dan pengurangan risiko bencana. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemetaan wilayah rawan bencana, banjir, dan kawasan kumuh. • Koordinasi pelaksanaan kegiatan infrastruktur berbasis padat karya. • Fasilitasi musrenbang kelurahan berbasis spasial dan kebutuhan nyata.

Sumber data: Bapelitbangda Kota Bekasi, 2025

Paraf Koordinasi	
Camat Pondokmelati	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	



Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2025–2029 telah disusun sebagai landasan pembangunan daerah selama lima tahun mendatang. Mengusung visi Jabar Istimewa, Lembur Diurus, Kota Ditata, RPJMD ini mencakup 25 Program Prioritas yang didukung 9 Langkah Strategis untuk menjawab tantangan pembangunan secara berkelanjutan, inklusif, dan berkeadilan. Kecamatan sebagai bagian dari perangkat daerah turut mendukung pencaipan Jabar Isimewa ke dalam program, kegiatan, dan subkegiatan yang relevan dengan kewenangannya. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi 2025-2029 juga telah disusun sebagai dasar dalam perencanaan pembangunan daerah Kota Bekasi dalam lima tahun kedepan dengan berpedoman pada RPJPD Kota Bekasi Tahun 2025- 2045, RPJPD Provinsi Jabar Tahun 2025-2045, serta RPJPN Tahun 2025-2045. Dengan mengusung Visi “ Kota Bekasi Nyaman dan Sejahtera”, yang diwujudkan melalui 5 (lima) misi. Ke-5 (lima) misi tersebut seperti pada gambar di bawah ini.

Gambar 3.3 Misi Kota Bekasi Tahun 2025-2029



Sumber data: RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025-2029

Paraf Koordinasi	
Camat Pondokmelati	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	



Ke-5 (lima) misi di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

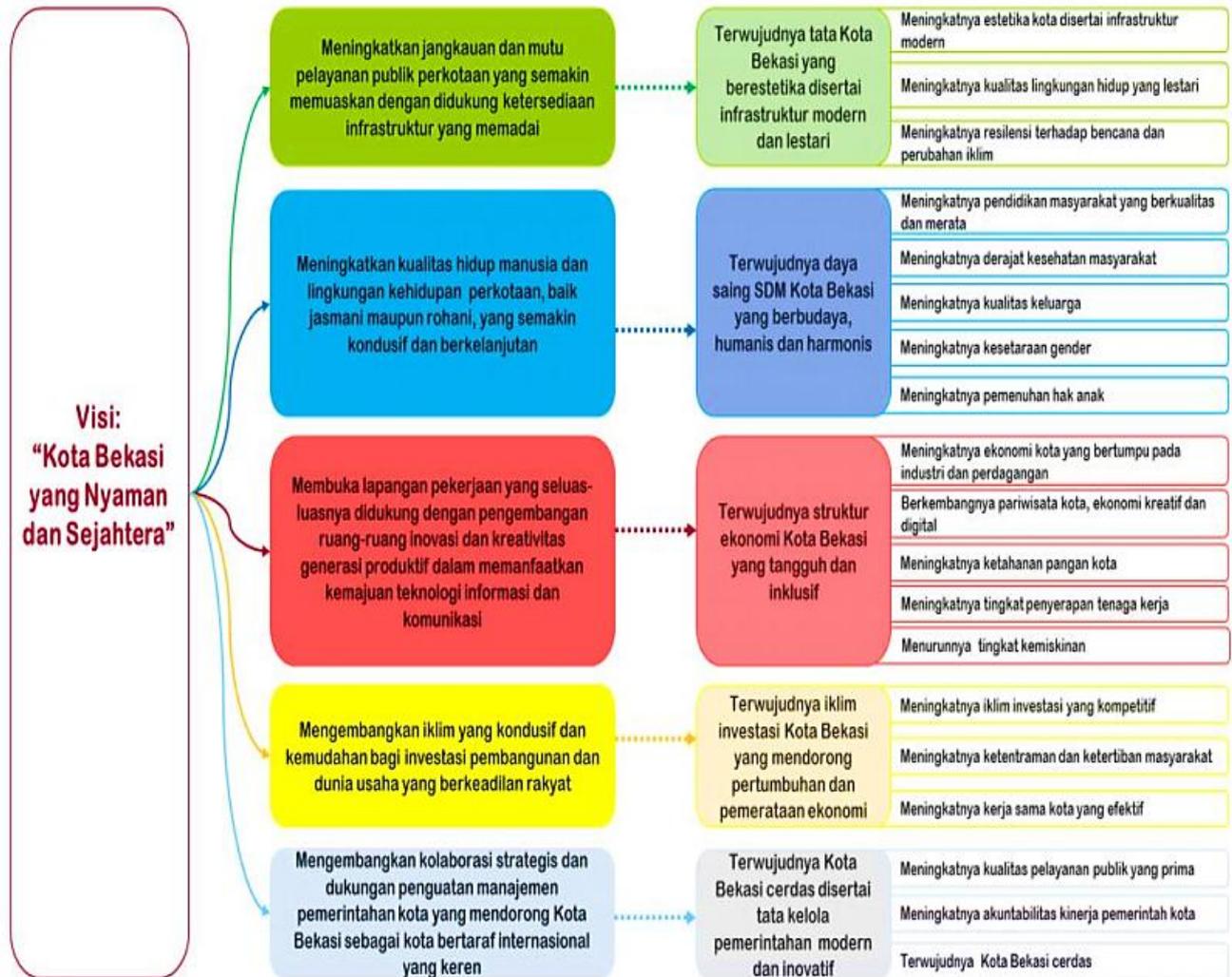
- 1) Misi pertama berkaitan dengan kepentingan: (1) mewujudkan pembangunan infrastruktur modern dan merata; (2) mengembangkan sarana dan prasarana pelayanan dasar yang berkualitas; dan (3) mewujudkan pembangunan kota yang berkelanjutan.
- 2) Misi kedua berkaitan dengan kepentingan: (1) mengembangkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, berakhlak, kreatif, dan berprestasi; dan (2) mewujudkan kehidupan masyarakat berbudaya, harmoni, dan peduli lingkungan.
- 3) Misi ketiga ini berkaitan dengan kepentingan meningkatkan kreativitas, inovasi, serta pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi bagi kelompok usia produktif lintas generasi, sehingga mampu berperan dan berkontribusi dalam pembangunan.
- 4) Misi keempat berkaitan dengan kepentingan: (1) mengembangkan perekonomian dengan penguatan UMKM, koperasi, dan BUMD, serta penguatan daya Tarik investasi, yang berkontribusi pada peningkatan nilai PDRB; dan (2) penyederhanaan birokrasi dan kepastian hukum untuk menjamin iklim investasi.
- 5) Misi kelima berkaitan dengan kepentingan meningkatkan kinerja tata kelola pemerintahan yang efektif, adaptif, responsif, dan akuntabel, sehingga mampu membentuk kota yang bertaraf internasional.

Visi dan misi tersebut akan dicapai melalui tujuan dan sasaran yang akan diwujudkan selama 5 (lima) tahun ke depan. Terdapat 5 (lima) tujuan dan 19 (sembilan belas) sasaran seperti pada gambar di bawah ini.

Paraf Koordinasi	
Camat Pondokmelati	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	



Gambar 3.4 Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Bekasi 2025-2029



Sumber data: RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025-2029

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, maka Rencana Strategis Kecamatan Pondokmelati mendukung misi, tujuan dan sasaran RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025-2029, sebagai berikut:

1. **Misi ke-1, yaitu “Meningkatkan jangkauan dan mutu pelayanan publik perkotaan yang semakin memuaskan dengan didukung ketersediaan infrastruktur yang memadai”**
2. **Misi ke-5 “Mengembangkan kolaborasi strategis dan dukungan penguatan manajemen pemerintahan kota yang mendorong Kota Bekasi sebagai kota bertaraf internasional yang keren”**

Paraf Koordinasi	
Camat Pondokmelati	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	



Selanjutnya untuk mencapai kondisi yang dirumuskan dalam tujuan dan sasaran strategis ditetapkan indikator kinerja sebagai tahapan penting yang ditargetkan dicapai per tahun. Penentuan sasaran strategis Kecamatan Pondokmelati didasarkan pada faktor penentu keberhasilan yang diidentifikasi sebagai kunci penyelesaian isu strategis. Sejalan dengan itu, maka Kecamatan Pondokmelati memiliki tujuan yang akan dicapai, yaitu :

1. Terwujudnya estetika kota disertai infrastruktur modern dan kualitas pelayanan publik yang prima di Kecamatan Pondokmelati;
Tujuan tersebut akan diukur melalui indikator kinerja tujuan, yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik.

Sedangkan Sasaran Kecamatan Pondokmelati yang akan dicapai adalah :

1. Meningkatnya LKM yang Mendukung Pelayanan Publik di Kecamatan Pondokmelati.

Sasaran tersebut akan diukur melalui indikator sasaran : Persentase LKM Aktif yang mendukung pelayanan publik.

2. Meningkatnya efektivitas pelayanan masyarakat di wilayah Kecamatan Pondokmelati.

Sasaran tersebut akan diukur melalui indikator sasaran : Persentase Peningkatan Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Pondokmelati;

Paraf Koordinasi	
Camat Pondokmelati	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Kecamatan Pondokmelati

Tujuan	Sasaran	IKU	Formulasi	Base Line Tahun 2024	Target Kinerja Tujuan / Sasaran Pada Tahun Ke-						Sumber Data
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1.1. Terwujudnya estetika kota disertai infrastruktur modern dan kualitas pelayanan publik yang prima di Kecamatan Pondokmelati		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik	IKM dihitung berdasarkan hasil Survey Kepuasan Masyarakat / Survei Pelayanan Publik melalui kuesioner yang terdiri dari pertanyaan terkait kinerja dan aparatur organisasi dalam memberikan pelayanan yang diisi oleh penerima layanan sebagai responden	84,94	85	85,20	85,40	85,70	86,00	86,35	Hasil Survey dan Pelaporan
	1.1.1. Meningkatnya LKM Aktif yang Mendukung Pelayanan Publik di Kecamatan Pondokmelati	Persentase LKM Aktif yang mendukung pelayanan publik	Persentase LKM Aktif = $\frac{\text{Jumlah LKM Aktif yang mendukung pelayanan publik}}{\text{Jumlah Total LKM}} \times 100\%$	65%	65%	67%	69%	71%	73%	75%	Hasil Perhitungan dan Pelaporan
	1.2.2. Meningkatnya efektivitas pelayanan masyarakat di wilayah Kecamatan Pondokmelati	Persentase Peningkatan Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Pondokmelati	Nilai IKM tahun N - Nilai IKM tahun (N-)/Nilai IKM tahun (n-1) x 100 %	n/a	0,07	0,24	0,24	0,35	0,35	0,40	Hasil Perhitungan dan Pelaporan

Sumber : Dokumen Perencanaan Tahun 2025, diolah

Paraf Koordinasi	
Camat Pondokmelati	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	



Penjelasan Tabel diatas adalah :

- 1.1 Meningkatnya LKM yang Mendukung Pelayanan Publik di Kecamatan Pondokmelati, Pencapaian IKU berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa, Pasal 6 ayat 1 diukur berdasarkan tingkat partisipasi aktif Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM), seperti RT, RW, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, Karang Taruna, Posyandu dan LPM. Dalam mendukung penyelenggaraan pelayanan publik. Dukungan ini dapat berupa partisipasi dalam perencanaan pembangunan (Musrenbang), implementasi program (seperti posyandu, bank sampah, keamanan lingkungan), maupun dalam melakukan pengawasan sosial. Target kenaikan sebesar 2% (dua persen) per tahun mencerminkan pendekatan yang realistis, terukur, dan berkelanjutan. Target ini mempertimbangkan kondisi eksisting dimana tidak semua LKM memiliki kapasitas dan kemauan yang sama untuk terlibat secara aktif. Pendekatan bertahap memungkinkan Pemerintah Kecamatan untuk fokus pada penguatan kualitas LKM yang telah aktif sambil secara paralel melakukan identifikasi, pendampingan, dan motivasi terhadap LKM yang belum aktif, sehingga keberhasilan yang dicapai dapat bersifat solid dan berkelanjutan (*sustainable*). Dengan mencapai target ini, diharapkan terjadi penguatan ekosistem kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat, yang pada akhirnya akan mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Pondokmelati.
- 1.2 Meningkatnya efektivitas pelayanan masyarakat di wilayah Kecamatan Pondokmelati, Berdasarkan hasil perhitungan yang telah dilakukan, target persentase peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Pondokmelati dari tahun 2025 hingga 2030 menunjukkan perkembangan yang dinamis dan penuh optimisme. Berikut adalah narasi yang menggambarkan makna dari setiap angka target tersebut: Pada tahun 2025, target peningkatan IKM ditetapkan sebesar 0,07%. Angka ini mencerminkan fase awal transisi dan konsolidasi dari

Paraf Koordinasi	
Camat Pondokmelati	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	



*Rancangan Awal
Rencana Strategis*

Kecamatan Pondokmelati Tahun 2025-2029

baseline tahun 2024. Peningkatan yang sangat kecil ini menunjukkan pendekatan yang hati-hati dan realistis, di mana upaya perbaikan pelayanan publik baru mulai dilakukan secara sistematis. Target ini menjadi fondasi yang kokoh untuk percepatan peningkatan di tahun-tahun berikutnya, sekaligus menjadi indikator bahwa langkah pertama menuju perbaikan telah berhasil diraih. Memasuki tahun 2026 dan 2027, target peningkatan mengalami lompatan signifikan menjadi sekitar 0,23%. Kedua angka ini (0,24% dan 0,24%) menunjukkan bahwa strategi perbaikan pelayanan mulai menunjukkan hasil. Momentum peningkatan telah terbangun dengan stabil, menandakan bahwa kebijakan dan program yang diterapkan di tahun sebelumnya mulai beradaptasi dan diterima dengan baik oleh masyarakat. Konsistensi angka di kedua tahun ini juga mengindikasikan adanya komitmen yang berkelanjutan tanpa adanya fluktuasi yang berarti. Pada tahun 2028 dan 2029, target peningkatan kembali melonjak hingga menyentuh kisaran 0,35%. Ini adalah bukti bahwa akselerasi perbaikan pelayanan publik sedang berjalan dengan optimal. Berbagai inovasi, seperti digitalisasi layanan, penyederhanaan prosedur, atau peningkatan kualitas sumber daya manusia, mulai memberikan dampak yang lebih konkret. Stabilitas angka di kedua tahun ini (hanya selisih 0,0014%) menunjukkan bahwa laju peningkatan telah memasuki fase matang dan terencana dengan baik. Tahun 2030 menjadi puncak dari seluruh perjalanan peningkatan IKM, dengan target peningkatan tertinggi sebesar 0,40%. Angka ini bukan hanya sekadar kenaikan, tetapi merupakan penanda keberhasilan kumulatif dari seluruh upaya yang telah dilakukan selama enam tahun. Target ini mencerminkan keyakinan bahwa semua langkah perbaikan—mulai dari yang paling dasar hingga inovasi terkini—telah terintegrasi dan memberikan dampak maksimal terhadap kepuasan masyarakat. Pencapaian ini juga menjadi dasar yang kuat untuk menetapkan target yang lebih ambisius di periode berikutnya. Dari narasi tersebut, dapat disimpulkan bahwa target

Paraf Koordinasi	
Camat Pondokmelati	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	



persentase peningkatan IKM Kecamatan Pondokmelati dari tahun 2025 hingga 2030 dirancang dengan sangat terukur dan progresif.

3.2 Strategi Dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah Dalam Mencapai Tujuan Dan Sasaran Renstra Pd Tahun 2025-2029

Strategi Renstra PD Tahun 2025–2029 merupakan rencana tindakan jangka menengah yang bersifat komprehensif dan sistematis. Strategi ini disusun untuk menjawab tantangan internal dan eksternal melalui langkah-langkah strategis yang mencakup optimalisasi sumber daya, penetapan tahapan pelaksanaan, penajaman fokus sasaran, serta perencanaan program, kegiatan, dan subkegiatan yang adaptif terhadap dinamika lingkungan. Dalam konteks ini, strategi bukan hanya menjadi pedoman teknis, melainkan juga alat pengarah untuk memastikan bahwa organisasi mampu bergerak secara terstruktur, terukur, dan efisien dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Penyusunan strategi ini memperhatikan perubahan regulasi, perkembangan teknologi, dinamika sosial masyarakat, serta tuntutan akuntabilitas dan transparansi publik.

Secara diagnostik, strategi ini muncul dari refleksi atas berbagai keterbatasan pada periode sebelumnya, seperti belum optimalnya sinergi antarunit kerja, lemahnya budaya kinerja berbasis hasil, serta kurangnya respons adaptif terhadap perubahan. Tantangan yang dihadapi antara lain adalah meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik, memperkuat kapasitas kelembagaan, serta membangun sistem perencanaan dan penganggaran yang lebih berbasis data dan kebutuhan riil masyarakat. Untuk itu, strategi ini menjadi sarana koreksi dan perbaikan menyeluruh terhadap proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program kerja ke depan.

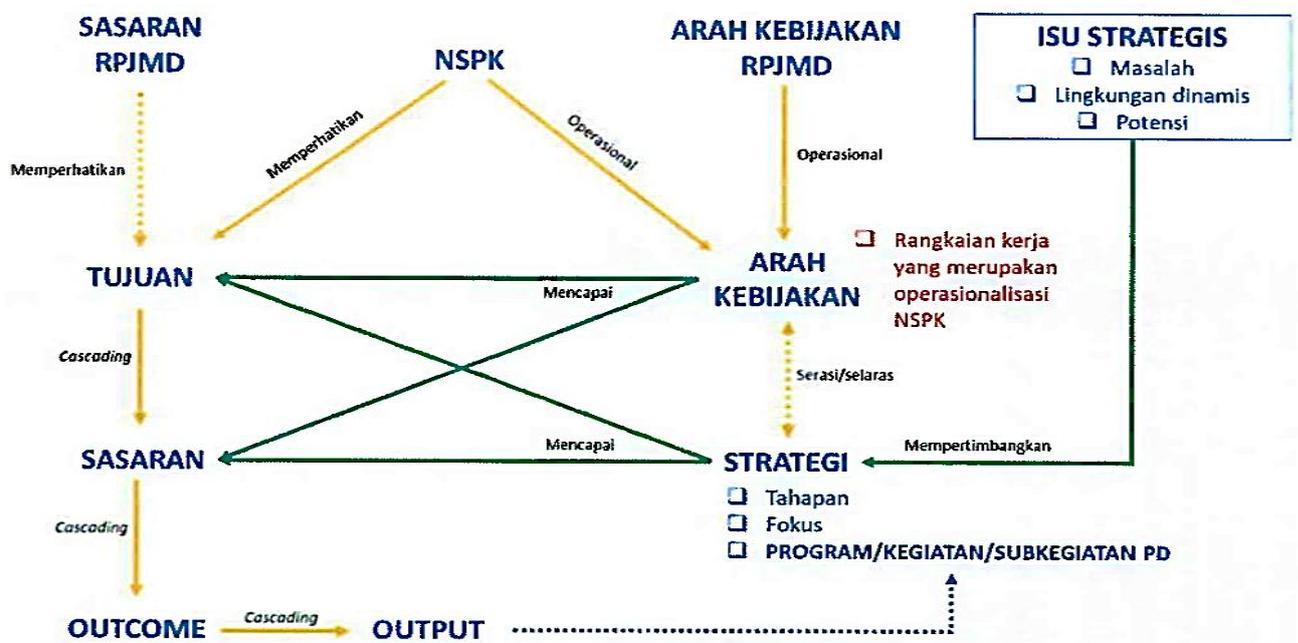
Sebagai tindak lanjut dari strategi ini, arah kebijakan difokuskan pada penguatan tata kelola organisasi yang akuntabel dan profesional melalui digitalisasi pelayanan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan penerapan sistem monitoring dan evaluasi

Paraf Koordinasi	
Camat Pondokmelati	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	



berbasis kinerja. Selain itu, kebijakan diarahkan pada pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan peningkatan partisipasi publik dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan. Fokus lainnya adalah pada efisiensi penggunaan anggaran melalui prioritas program yang memiliki dampak langsung terhadap masyarakat serta adaptasi terhadap kebijakan pusat dan dinamika lokal. Dengan demikian, arah kebijakan dalam Renstra ini bertujuan untuk mewujudkan organisasi yang tanggap, lincah, dan berorientasi pada hasil dalam memberikan layanan terbaik bagi masyarakat.

Gambar 3.2 Konsep Renstra PD

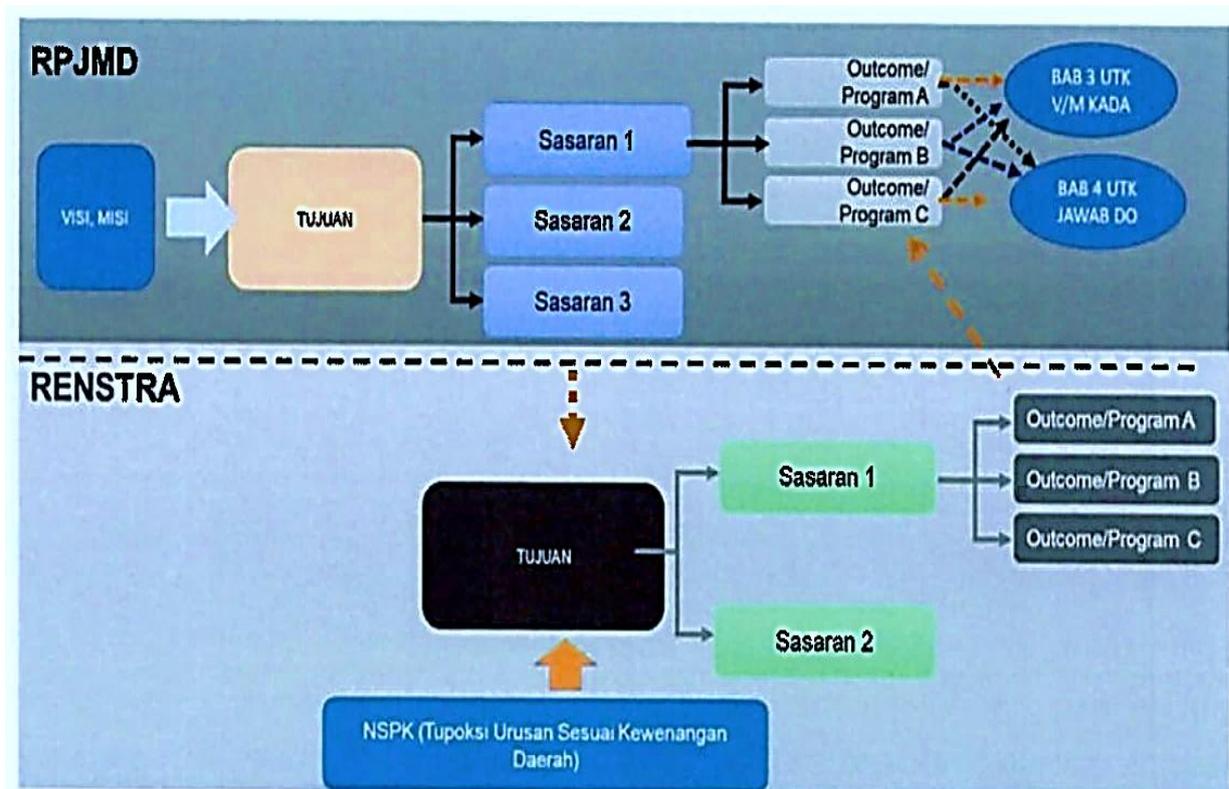


Sumber : Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029, diolah

Paraf Koordinasi	
Camat Pondokmelati	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	



Gambar 3.3 Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra PD



Sumber : Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029, diolah

Tabel 3.3 Penahapan Renstra PD

tahap 1	tahap 2	tahap 3	tahap 4	tahap 5
Fokus melakukan pendataan komprehensif terhadap seluruh LKM yang ada di wilayah Kecamatan Pondokmelati. Kami akan memetakan tidak hanya jumlah dan sebarannya, tetapi juga kapasitas kelembagaan, sumber daya manusia, peran yang selama ini dijalankan, serta kendala yang dihadapi masing-masing LKM. Melalui pendekatan partisipatif, kami akan mendengarkan secara langsung kebutuhan dan aspirasi mereka. Hasil dari tahap ini adalah sebuah database yang hidup dan sebuah peta jalan penguatan LKM yang tepat sasaran, disusun	peningkatan kemampuan teknis dan manajerial pengurus LKM. Program pelatihan yang aplikatif dan sesuai kebutuhan akan dilaksanakan, mencakup manajemen organisasi, administrasi keuangan sederhana, perencanaan program, dan teknik komunikasi dengan masyarakat. Tujuannya adalah membangun kepercayaan diri dan kapabilitas pengurus dalam mengelola organisasinya secara lebih profesional dan transparan, sehingga LKM memiliki pondasi internal yang kuat	LKM yang telah memiliki kapasitas dasar kemudian secara aktif diintegrasikan ke dalam ekosistem pelayanan publik. Pada tahap ini, kami membangun jalur komunikasi dan kolaborasi yang formal dan berkelanjutan antara LKM dengan pemerintah kelurahan dan kecamatan. LKM mulai dilibatkan dalam proses perencanaan pembangunan (Musrenbang), menjadi mediator dalam penyampaian aspirasi masyarakat, dan berperan sebagai penyambung lidah dalam sosialisasi kebijakan	Memasuki era digital, tahap ini mendorong LKM untuk beradaptasi dan memanfaatkan teknologi. Pengurus LKM akan dibekali dengan literasi digital untuk mendukung fungsi mereka. Mereka dapat dilatih untuk menggunakan platform sederhana untuk pendataan warga, membantu masyarakat mengakses pelayanan online, atau memanfaatkan media sosial untuk	Tahap puncak dari perjalanan ini adalah memastikan kemandirian dan keberlanjutan peran LKM. Fokusnya bergeser dari pendampingan intensif kepada pendampingan yang bersifat fasilitatif. LKM didorong untuk mampu merancang program, mencari sumber pendanaan yang kreatif, dan mengevaluasi kinerjanya sendiri. Kami akan mendokumentasikan praktik-praktik terbaik dan model LKM yang berhasil

Paraf Koordinasi	
Camat Pondokmelati	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	



tahap 1	tahap 2	tahap 3	tahap 4	tahap 5
berdasarkan potensi dan realitas yang ada.	sebelum diperankan lebih luas.	pelayanan. Sinergi ini menciptakan hubungan kemitraan yang saling menguntungkan dan memperkuat legitimasi LKM di mata masyarakat.	komunikasi yang lebih efektif.	untuk menjadi contoh dan direplikasi.
Fokus pada penyusunan dan penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk layanan dasar di seluruh unit pelayanan, menjamin konsistensi dan kejelasan proses.	Menyederhanakan birokrasi, memangkas rantai prosedur yang berbelit, dan mengintegrasikan layanan yang terpisah untuk mengurangi waktu dan biaya bagi masyarakat.	Pelatihan kompetensi teknis dan soft skills bagi pelayan publik, dengan penekanan pada komunikasi, etika pelayanan, dan penyelesaian keluhan.	Mengembangkan platform layanan digital seperti aplikasi pelaporan online, sistem antrean elektronik, dan informasi terintegrasi untuk meningkatkan aksesibilitas dan transparansi.	Memantau kepuasan masyarakat melalui survei IKM, mereview kinerja layanan, dan mengembangkan model inovasi pelayanan yang responsif terhadap kebutuhan terkini.

Sumber : kertas kerja perencanaan Kecamatan Pondokmelati Tahun 2025-2029, diolah

Strategi Terintegrasi: Memperkuat LKM untuk Mendorong Pelayanan Publik yang Berkualitas Sebagai fondasi awal, Tahap 1 difokuskan pada Pemetaan Komprehensif. Kami melakukan pendataan mendalam terhadap seluruh Lembaga Kemasyarakatan (LKM) di Kecamatan Pondokmelati untuk memahami kekuatan, kelemahan, dan peran mereka. Secara paralel, kami menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk seluruh unit pelayanan guna menciptakan dasar kerja yang konsisten dan jelas.

Dengan peta yang jelas, Tahap 2 berfokus pada Penguatan Kapasitas. Pengurus LKM dibekali pelatihan teknis dan manajerial—seperti administrasi keuangan dan perencanaan program—untuk membangun pondasi internal yang kuat. Bersamaan dengan itu, aparat pelayanan publik juga ditingkatkan kompetensinya melalui pelatihan soft skills, etika pelayanan, dan penyelesaian keluhan, sehingga kedua belah pihak siap berkolaborasi.

Tahap 3 adalah tahap Integrasi dan Sinergi. LKM yang telah berkemampuan diajak berkolaborasi secara formal dengan pemerintah kelurahan dan kecamatan. Mereka dilibatkan dalam Musrenbang dan menjadi mediator aspirasi masyarakat. Pada sisi birokrasi, prosedur yang berbelit dipangkas dan layanan yang terpisah diintegrasikan untuk

Paraf Koordinasi	
Camat Pondokmelati	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	



mempermudah akses masyarakat, dimana LKM dapat berperan sebagai penyambung informasi.

Memasuki Tahap 4, kami melakukan Akselerasi Digital. LKM didorong untuk memanfaatkan teknologi, seperti menggunakan platform digital untuk pendataan dan membantu masyarakat mengakses layanan online. Hal ini sejalan dengan pengembangan platform digital resmi oleh pemerintah, seperti aplikasi pelaporan online dan sistem antrian elektronik, untuk menciptakan transparansi dan efisiensi.

Akhirnya, Tahap 5 menitikberatkan pada Keberlanjutan dan Inovasi. Fokusnya adalah memastikan kemandirian LKM dalam mengelola program dan pendanaan, didukung oleh pendampingan fasilitatif. Sementara itu, pemerintah terus memantau kepuasan masyarakat melalui survei, mengevaluasi kinerja layanan, dan mengembangkan inovasi yang responsif. Dengan ini, tercipta sebuah ekosistem dimana LKM yang mandiri dan pemerintah yang inovatif bersama-sama menjaga kualitas pelayanan publik yang berkelanjutan.

Tabel 3.4 Strategi Dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah Dalam Mencapai Tujuan Dan Sasaran Renstra Pd

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Terwujudnya estetika kota disertai infrastruktur modern dan kualitas pelayanan publik yang prima di Kecamatan Pondokmelati	Meningkatnya LKM yang Mendukung Pelayanan Publik di Kecamatan Pondokmelati	<ul style="list-style-type: none"> Pemberdayaan LKM melalui pelatihan, pendampingan, dan fasilitasi kegiatan Meningkatkan kolaborasi antara LKM dan aparatur kecamatan. 	<ul style="list-style-type: none"> peningkatan kapasitas dan insentif untuk LKM Kegiatan kemitraan strategis antara pemerintah dan LKM dalam pelayanan masyarakat
	Meningkatnya efektivitas pelayanan masyarakat di wilayah Kecamatan Pondokmelati	<ul style="list-style-type: none"> Digitalisasi layanan publik dan simplifikasi prosedur pelayanan Pelatihan dan peningkatan kapasitas aparatur kecamatan 	<ul style="list-style-type: none"> Implementasi sistem layanan terpadu berbasis digital Evaluasi dan penyederhanaan SOP pelayanan publik Peningkatan kualitas SDM melalui pelatihan berkala

Sumber : Dokumen perencanaan Kecamatan Pondokmelati Tahun 2025-2029, diolah

Paraf Koordinasi	
Camat Pondokmelati	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	



BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Program, Kegiatan, Sub Kegiatan

Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan merupakan hasil dari proses cascading atau penjabaran yang sistematis dari tujuan, sasaran, outcome, dan output organisasi perangkat daerah. Dalam kerangka perencanaan pembangunan, pendekatan ini memastikan adanya keterkaitan logis antara visi dan misi Kepala Daerah dengan implementasi teknis di tingkat pelaksana.

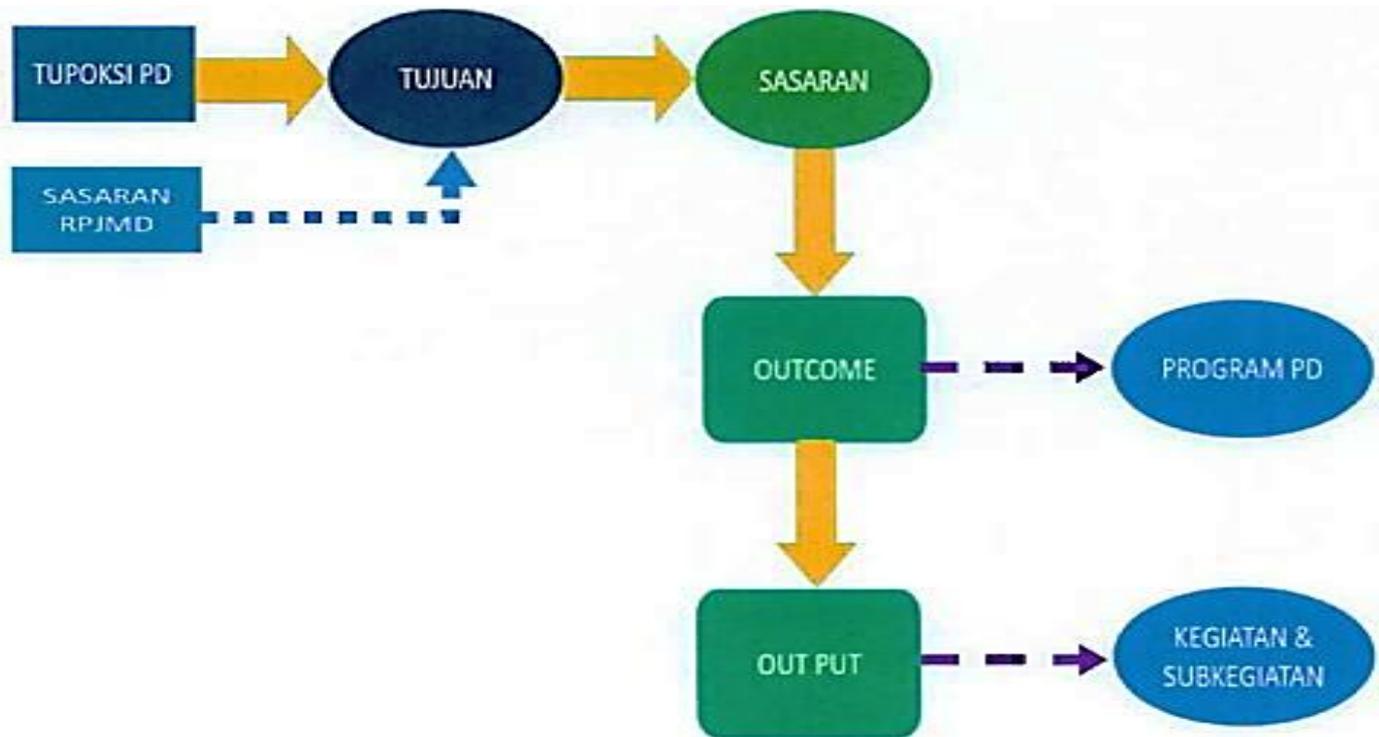
Penjabaran ini dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh intervensi pembangunan yang dirancang mampu menjawab permasalahan dan isu strategis daerah. Dengan demikian, setiap program tidak hanya sekadar daftar kegiatan, tetapi mengandung nilai strategis yang mendukung capaian sasaran kinerja organisasi secara terukur dan akuntabel.

Rencana strategis juga disusun dengan mempertimbangkan sinkronisasi vertikal dan horizontal, baik dengan dokumen perencanaan nasional dan provinsi (RPJMN, RKP, RPJMD Provinsi), maupun antar-perangkat daerah. Hal ini dilakukan untuk menjamin adanya keselarasan dan sinergi antarkebijakan demi pencapaian pembangunan yang berdaya guna dan berhasil guna. Perencanaan program, kegiatan, dan subkegiatan disusun secara berkelanjutan mulai tahun 2025 hingga tahun 2030 untuk memastikan pencapaian kinerja organisasi secara konsisten. Tahun 2030 diposisikan sebagai bagian dari kesinambungan strategi pembangunan, sehingga penting ditegaskan bahwa program pada tahun tersebut menjadi pijakan dalam penyusunan rencana kerja perangkat daerah dan menjaga arah kebijakan tetap selaras dengan tujuan jangka menengah yang telah ditetapkan.

Paraf Koordinasi	
Camat Pondokmelati	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	



Gambar 4.1 Kerangka Perumusan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Kecamatan Pondokmelati



Sumber : Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029

Paraf Koordinasi	
Camat Pondokmelati	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	



Tabel 4.2 Rumusan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kecamatan Pondokmelati Tahun 2025-2029

SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN RENSTRA OPD	SASARAN	OUTCOME	Output	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	PERANGKAT DAERAH
4	7	9	11		12	13	14
	Terwujudnya estetika kota disertai infrastruktur modern dan kualitas pelayanan publik yang prima di Kecamatan Pondokmelati				Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik		
1. Meningkatnya estetika kota disertai infrastruktur modern		Meningkatnya LKM yang Mendukung Pelayanan Publik di Kecamatan Pondokmelati			Persentase LKM yang Aktif		
			Meningkatnya LKM yang mendukung pelayanan publik		Persentase LKM yang Aktif	1. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Evaluasi Kelurahan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Jatirahayu) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Jatiwarna) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Jatimelati) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Jatimurni) Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Jatirahayu) Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Jatiwarna)	Kecamatan Pondokmelati
Paraf Koordinasi Camat Pondokmelati Kepala Bappelitbangda Kabag Hukum							



SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN RENSTRA OPD	SASARAN	OUTCOME	Output	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	PERANGKAT DAERAH
						Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Jatimelati) Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Jatimurni) Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Jatirahayu) Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Jatiwarna) Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Jatimelati) Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Jatimurni) Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Kecamatan Pondokmelati) Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Kelurahan Jatirahayu) Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Kelurahan Jatiwarna) Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Kelurahan Jatimelati) Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Kelurahan Jatimurni)	
2. Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang prima Camat Pondokmelati Kepala Bappelitbangda Kabag Hukum Paraf Koordinasi		Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang prima pada Kecamatan Pondokmelati	Meningkatnya efektivitas pelayanan masyarakat di wilayah kecamatan		Persentase Peningkatan Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Pondokmelati Indeks Kepuasan Masyarakat	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal Yang Terkait Dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum di Kecamatan Pondokmelati	Kecamatan Pondokmelati



SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN RENSTRA OPD	SASARAN	OUTCOME	Output	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	PERANGKAT DAERAH				
<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr><td style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Paraf Koordinasi</td></tr> <tr><td style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Camat Pondokmelati</td></tr> <tr><td style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Kepala Bappelitbangda</td></tr> <tr><td style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Kabag Hukum</td></tr> </table>	Paraf Koordinasi	Camat Pondokmelati	Kepala Bappelitbangda	Kabag Hukum						Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal Yang Terkait Dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum (Kelurahan Jatirahayu)	
	Paraf Koordinasi										
	Camat Pondokmelati										
	Kepala Bappelitbangda										
	Kabag Hukum										
	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal Yang Terkait Dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum (Kelurahan Jatiwarna)										
	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal Yang Terkait Dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum (Kelurahan Jatimlati)										
	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal Yang Terkait Dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum (Kelurahan Jatimurni)										
	3. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum										
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum										
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan											
Harmonisasi Hubungan Dengan tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Kecamatan Pondokmelati)											
4. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum											
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan Di Kecamatan											
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan											
5. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota											
Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											



SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN RENSTRA OPD	SASARAN	OUTCOME	Output	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	PERANGKAT DAERAH
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> Paraf Koordinasi Camat Pondokmelati Kepala Bappelitbangda Kabag Hukum </div>			1. Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah dengan Penganggaran;		Persentase Keselarasan Perencanaan Perencanaan Perangkat Daerah dengan Penganggaran	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
			2. Meningkatnya Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan		Persentase Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	
			3. Meningkatnya Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Perangkat Daerah;		Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Sosialisasi Peraturan PerundangUndangan	
			4. Meningkatnya Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel.		Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	



SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN RENSTRA OPD	SASARAN	OUTCOME	Output	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	PERANGKAT DAERAH
						Pengadaan Mebel Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	

Sumber : Dokumen Perencanaan Kecamatan Pondokmelati Tahun 2025-2029

Paraf Koordinasi	
Camat Pondokmelati	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Tabel 4.3 Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra PD

Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program/Outcome / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/SubKegiatan	Baseline 2024	TARGET KINERJA PROGRAM KERANGKA PENDANAAN												Ket
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				18.631.928.770,00		18.727.072.600		19.357.041.120		21.379.166.900		23.334.166.900		25.159.166.900	
Outcome: Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah dengan Penganggaran	Persentase Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah dengan Penganggaran	100	100	1.000.000	100	2.000.000	100	10.000.000	100	10.000.000	100	5.000.000	100	10.000.000	
Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terpenuhinya layanan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	1.000.000	100%	2.000.000	100%	10.000.000	100%	10.000.000	100%	5.000.000	100%	10.000.000	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-	-	-	-	-	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	2.500.000	1 Dokumen	5.000.000	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1.000.000	1 Laporan	2.000.000	1 Laporan	5.000.000	1 Laporan	5.000.000	1 Laporan	2.500.000	1 Laporan	5.000.000	
Outcome: Meningkatnya Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan	Persentase Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan	95,35	95,35	12.473.060.000	95,44	15.716.532.000	95,53	15.723.532.000	95,62	17.523.532.000	95,71	19.523.532.000	95,71	21.323.532.000	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terselenggaranya layanan Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	12.473.060.000	100%	15.716.532.000	100%	15.723.532.000	100%	17.523.532.000	100%	19.523.532.000	100%	21.323.532.000	

Paraf Koordinasi

Camat Pondokmelati	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program/Outcome / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/SubKegiatan	Baseline 2024	TARGET KINERJA PROGRAM KERANGKA PENDANAAN												Ket
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	OB	1188 OB	12.470.060.000	3321 OB	15.713.532.000	3321 OB	15.713.532.000	3321 OB	17.513.532.000	3321 OB	19.513.532.000	3321 OB	21.313.532.000	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	3.000.000,00	1 Laporan	3.000.000	1 Laporan	5.000.000							
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	-	-	-	-	-	2 Laporan	5.000.000							
Outcome: Meningkatnya Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Perangkat Daerah	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Perangkat Daerah	84,10	84,10	37.000.000	84,18	0	84,18	262.500.000	84,32	302.500.000	84,42	352.500.000	84,42	352.500.000	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%	100%	37.000.000	-	-	100%	260.000.000	100%	300.000.000	100%	350.000.000	100%	350.000.000	
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Yang Disediakan	-	-	-	-	-	1 Paket	160.000.000	1 Paket	200.000.000	1 Paket	250.000.000	1 Paket	250.000.000	
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	5 Orang	37.000.000	5 Orang	37.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	
Sosialisasi Peraturan PerundangUndangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan PerundangUndangan	-	-	-	-	-	150 Orang	100.000.000	140 Orang	100.000.000	140 Orang	100.000.000	140 Orang	100.000.000	

Paraf Koordinasi

Camat Pondokmelati	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program/Outcome / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/SubKegiatan	Baseline 2024	TARGET KINERJA PROGRAM KERANGKA PENDANAAN												Ket	
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	-	-	100%	2.500.000	100%	2.500.000	100%	2.500.000	100%	2.500.000	100%	2.500.000	
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	-	-	-	1 Laporan	2.500.000									
Outcome: Meningkatnya Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel	100	100	6.117.868.770	100%	6.889.386.820	100%	7.213.981.120	100%	7.223.981.120	100%	6.833.981.120	100%	6.653.981.120		
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100%	369.987.650	100%	457.780.000	100%	750.000.000	100%	910.000.000	100%	590.000.000	100%	610.000.000		
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1 Paket	20.000.000	1 Paket	15000.000	1 Paket	15.000.000	1 Paket	35.000.000	1 Paket	15.000.000	1 Paket	35.000.000		
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	-	-	-	1 Paket	150.000.000	1 Paket	450.000.000	1 Paket	150.000.000	1 Paket	150.000.000	1 Paket	150.000.000	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	4 Paket	189.568.000	4 Paket	210.000.000	4 Paket	250.000.000	4 Paket	200.000.000	4 Paket	200.000.000	4 Paket	200.000.000		
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2 Paket	53.384.650	2 Paket	30.000.000	2 Paket	45.000.000								
Penyediaan Bahan Peraturan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	1 Dokumen	40.000.000	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	40.000.000								
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat	Laporan	1 Laporan	67.035.000	1 Laporan	100.610.000	1 Laporan	150.000.000	1 Laporan	90.000.000	1 Laporan	90.000.000	1 Laporan	90.000.000		

Paraf Koordinasi

Camat Pondokmelati	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program/Outcome / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/SubKegiatan	Baseline 2024	TARGET KINERJA PROGRAM KERANGKA PENDANAAN												Ket
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
dan Konsultasi SKPD	Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	-	-	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Yang Tersedia	100%	-	-	100%	592.625.700	100%	420.000.000	100%	260.000.000	100%	200.000.000	100%	0	
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-	-	-	20 Unit	148.956.000	10 Unit	170.000.000	7 Unit	60.000.000	-	-	-	-	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya Yang Disediakan	10 Unit	-	-	30 Unit	443.669.700	25 Unit	250.000.000	25 Unit	200.000.000	20 Unit	200.000.000	-	-	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	5.320.981.120	100%	5.323.981.120	100%	5.423.981.120	100%	5.423.981.120	100%	5.423.981.120	100%	5.423.981.120	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	200.000.000	12 Laporan	200.000.000	12 Laporan	300.000.000							
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	5.123.981.120	12 Laporan	5.123.981.120	12 Laporan	5.123.981.120	12 Laporan	5.123.981.120	12 Laporan	5.123.981.120	12 Laporan	5.123.981.120	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	terpeliharanya Barang Milik Daerah	100%	100%	426.900.000	100%	515.000.000	100%	620.000.000	100%	630.000.000	100%	620.000.000	100%	620.000.000	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit	2 Unit	60.000.000	2 Unit	60.000.000	2 Unit	80.000.000	2 Unit	90.000.000	2 Unit	80.000.000	2 Unit	80.000.000	

Paraf Koordinasi

Camat Pondokmelati	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program/Outcome / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/SubKegiatan	Baseline 2024	TARGET KINERJA PROGRAM KERANGKA PENDANAAN												Ket
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	30 Unit	30 Unit	147.000.000	30 Unit	185.000.000	30 Unit	190.000.000							
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 Unit	30 Unit	35.000.000	30 Unit	70.000.000	30 Unit	100.000.000							
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7 Unit	3 Unit	184.900.000	3 Unit	200.000.000	3 Unit	250.000.000	3 Unit	250.000.000	4 Unit	250.000.000	3 Unit	250.000.000	
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Peningkatan Kepuasan Masyarakat di Kecamatan	%	100%	267.590.000	100%	260.000.000									
Outcome : Meningkatnya efektivitas pelayanan masyarakat di wilayah kecamatan	Persentase Peningkatan Kepuasan Masyarakat di Kecamatan		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	100%	100%	50.000.000	100%	30.000.000	100%	50.000.000	100%	50.000.000	100%	50.000.000	100%	50.000.000	
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4 Laporan	4 Laporan	50.000.000	4 Laporan	30.000.000	4 Laporan	50.000.000							
Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Terlaksananya Kegiatan Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/ atau Instansi Vertikal yang Terkait	100%	100%	217.590.000	100%	210.000.000	100%	350.000.000	100%	350.000.000	100%	260.000.000	100%	310.773.351	

Paraf Koordinasi

Camat Pondokmelati	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program/Outcome / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/SubKegiatan	Baseline 2024	TARGET KINERJA PROGRAM KERANGKA PENDANAAN												Ket
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum														
Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal Yang Terkait Dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum di Kecamatan Pondokmelati	Jumlah Dokumen dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	12 Laporan	12 Laporan	107.590.000	12 Laporan	50.000.000	12 Laporan	150.000.000	12 Laporan	150.000.000	12 Laporan	100.000.000	12 Laporan	150.773.351	
Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal Yang Terkait Dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum (Kelurahan Jatirahayu)	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	12 Laporan	12 Laporan	50.000.000	12 Laporan	40.000.000	12 Laporan	50.000.000	12 Laporan	50.000.000	12 Laporan	40.000.000	12 Laporan	40.000.000	
Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal Yang Terkait Dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum (Kelurahan Jatiwarna)	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	12 Laporan	12 Laporan	20.000.000	12 Laporan	40.000.000	12 Laporan	50.000.000	12 Laporan	50.000.000	12 Laporan	40.000.000	12 Laporan	40.000.000	

Paraf Koordinasi

Camat Pondokmelati	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program/Outcome / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/SubKegiatan	Baseline 2024	TARGET KINERJA PROGRAM KERANGKA PENDANAAN												Ket
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal Yang Terkait Dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum (Kelurahan Jatimlati)	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	12 Laporan	12 Laporan	20.000.000	12 Laporan	40.000.000	12 Laporan	50.000.000	12 Laporan	50.000.000	12 Laporan	40.000.000	12 Laporan	40.000.000	
Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal Yang Terkait Dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum (Kelurahan Jatimurni)	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	12 Laporan	12 Laporan	20.000.000	12 Laporan	40.000.000	12 Laporan	50.000.000	12 Laporan	50.000.000	12 Laporan	40.000.000	12 Laporan	40.000.000	
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase LKM yang aktif		100%	12.869.372.600	100%	15.432.054.400	100%	15.870.259.400	100%	15.870.259.400	100%	15.870.259.400	100%	15.870.259.400	
Outcome : Meningkatnya LKM yang mendukung pelayanan publik		100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Terselenggaranya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	100%	100%	12.549.372.600	100%	15.003.514.400	100%	15.153.334.666	100%	15.333.054.400	100%	15.431.830.048	100%	15.265.830.048	
Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Lembaga Kemasyarakatan	15 Lembaga Kemasyarakatan	181.617.000	15 Lembaga Kemasyarakatan	125.000.000	15 Lembaga Kemasyarakatan	170.000.000	15 Lembaga Kemasyarakatan	300.000.000	15 Lembaga Kemasyarakatan	300.000.000	15 Lembaga Kemasyarakatan	150.000.000	

Paraf Koordinasi

Camat Pondokmelati	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program/Outcome / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/SubKegiatan	Baseline 2024	TARGET KINERJA PROGRAM KERANGKA PENDANAAN												Ket
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
pembangunan di kelurahan															
Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	1 Laporan	1 Laporan	40.000.000	1 Laporan	30.000.000	1 Laporan	70.280.266	1 Laporan	120.000.000	1 Laporan	120.000.000	1 Laporan	120.000.000	
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Jatirahayu)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan Yang Terbangun	1 Unit	1 Unit	200.000.000	1 Unit	200.000.000	1 Unit	200.000.000	1 Unit	200.000.000	1 Unit	200.000.000	1 Unit	200.000.000	
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Jatiwarna)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan Yang Terbangun	1 Unit	1 Unit	200.000.000	1 Unit	200.000.000	1 Unit	200.000.000	1 Unit	200.000.000	1 Unit	200.000.000	1 Unit	200.000.000	
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Jatimelati)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan Yang Terbangun	1 Unit	1 Unit	200.000.000	1 Unit	200.000.000	1 Unit	200.000.000	1 Unit	200.000.000	1 Unit	200.000.000	1 Unit	200.000.000	
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Jatimurni)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan Yang Terbangun	1 Unit	1 Unit	200.000.000	1 Unit	200.000.000	1 Unit	200.000.000	1 Unit	200.000.000	1 Unit	200.000.000	1 Unit	200.000.000	
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas	4 Pokmas/Ormas	170.000.000	4 Pokmas/Ormas	171.460.000	4 Pokmas/Ormas	220.000.000	4 Pokmas/Ormas	220.000.000	4 Pokmas/Ormas	318.775.648	4 Pokmas/Ormas	318.775.648	
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Jatirahayu)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	306 Pokmas/Ormas	306 Pokmas/Ormas	4.952.586.000	306 Pokmas/Ormas	5.450.742.000	306 Pokmas/Ormas	5.452.742.000	306 Pokmas/Ormas	5.452.742.000	306 Pokmas/Ormas	5.452.742.000	306 Pokmas/Ormas	5.450.742.000	

Paraf Koordinasi

Camat Pondokmelati	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program/Outcome / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/SubKegiatan	Baseline 2024	TARGET KINERJA PROGRAM KERANGKA PENDANAAN												Ket
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Jatiwarna)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	7 Pokmas	7 Pokmas/ Ormas	2.386.744.800	7 Pokmas/ Ormas	2.579.821.800	7 Pokmas / Ormas	2.581.821.800	7 Pokmas/ Ormas	2.581.821.800	7 Pokmas / Ormas	2.581.821.800	7 Pokmas/ Ormas	2.579.821.800	
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Jatimelati)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	7 Pokmas	7 Pokmas/ Ormas	1.579.626.000	7 Pokmas/ Ormas	3.263.668.800	7 Pokmas / Ormas	3.269.668.800	7 Pokmas/ Ormas	3.269.668.800	7 Pokmas / Ormas	3.269.668.800	7 Pokmas/ Ormas	3.263.668.800	
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Jatimurni)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	7 Pokmas	7 Pokmas /Ormas	2.453.715.800	7 Pokmas /Ormas	2.582.821.800	7 Pokmas /Ormas	2.588.821.800	7 Pokmas/ Ormas	2.588.821.800	7 Pokmas / Ormas	2.588.821.800	7 Pokmas/ Ormas	2.582.821.800	
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Terselenggaranya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	%	100%	320.000.000	100%	320.000.000	100%	500.000.000	100%	600.000.000	100%	600.000.000	100%	600.000.000	
Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Jatirahayu)	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Di Selenggarakan	2Lembaga Kemasyarakatan	2 Lembaga Kemasyarakatan	40.000.000	2Lembaga Kemasyarakatan	40.000.000	2Lembaga Kemasyarakatan	50.000.000	2Lembaga Kemasyarakatan	50.000.000	2Lembaga Kemasyarakatan	50.000.000	2Lembaga Kemasyarakatan	50.000.000	
Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Jatiwarna)	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Di Selenggarakan	2Lembaga Kemasyarakatan	2 Lembaga Kemasyarakatan	40.000.000	2 Lembaga Kemasyarakatan	40.000.000	2 Lembaga Kemasyarakatan	50.000.000	2 Lembaga Kemasyarakatan	50.000.000	2 Lembaga Kemasyarakatan	50.000.000	2Lembaga Kemasyarakatan	50.000.000	
Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Jatimelati)	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Di Selenggarakan	2Lembaga Kemasyarakatan	2Lembaga Kemasyarakatan	40.000.000	2Lembaga Kemasyarakatan	40.000.000	2Lembaga Kemasyarakatan	50.000.000	2Lembaga Kemasyarakatan	50.000.000	2Lembaga Kemasyarakatan	50.000.000	2Lembaga Kemasyarakatan	50.000.000	
Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Jatimurni)	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Di Selenggarakan	2Lembaga Kemasyarakatan	2Lembaga Kemasyarakatan	40.000.000	2Lembaga Kemasyarakatan	40.000.000	2Lembaga Kemasyarakatan	50.000.000	2Lembaga Kemasyarakatan	50.000.000	2Lembaga Kemasyarakatan	50.000.000	2Lembaga Kemasyarakatan	50.000.000	

Paraf Koordinasi

Camat Pondokmelati	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program/Outcome / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/SubKegiatan	Baseline 2024	TARGET KINERJA PROGRAM KERANGKA PENDANAAN												Ket
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Kecamatan Pondokmelati)	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1 Laporan	1 Laporan	80.000.000	1 Laporan	60.000.000	1 Laporan	100.000.000	1 Laporan	200.000.000	1 Laporan	200.000.000	1 Laporan	200.000.000	
Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (KelurahanJatirahayu)	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1 Laporan	1 Laporan	20.000.000	1 Laporan	25.000.000	1 Laporan	50.000.000							
Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Kelurahan Jatiwarna)	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1 Laporan	1 Laporan	20.000.000	1 Laporan	25.000.000	1 Laporan	50.000.000							
Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Kelurahan Jatimelati)	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1 Laporan	1 Laporan	20.000.000	1 Laporan	25.000.000	1 Laporan	50.000.000							
Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Kelurahan Jatimurni)	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1 Laporan	1 Laporan	20.000.000	1 Laporan	25.000.000	1 Laporan	50.000.000							
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase penanganan kasus perselisihan dan konflik masyarakat		100%	50.000.000	100%	20.000.000	100%	141.000.000	100%	150.000.000	100%	150.000.000	100%	100.000.000	
Outcome : Meningkatnya Penanganan Potensi Konflik di wilayah Kecamatan		100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi	Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi	100%	100%	50.000.000	100%	20.000.000	100%	141.000.000	100%	150.000.000	100%	150.000.000	100%	100.000.000	

Paraf Koordinasi

Camat Pondokmelati	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program/Outcome / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/SubKegiatan	Baseline 2024	TARGET KINERJA PROGRAM KERANGKA PENDANAAN												Ket
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Pimpinan Di Kecamatan	Pimpinan di Kecamatan														
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	20.000.000	1 Dokumen	141.000.000	1 Dokumen	150.000.000	1 Dokumen	150.000.000	1 Dokumen	100.000.000	
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase wilayah tertib		100%	496.972.000	100%	400.000.000	100%	555.000.000	100%	400.000.000	100%	400.000.000	100%	400.000.000	
Outcome : Meningkatnya penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum		100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Terlaksananya kegiatan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di Kecamatan Pondokmelati	100%	100%	49.690.972.000	100%	400.000.000	100%	555.000.000	100%	555.000.000	100%	555.000.000	100%	555.000.000	
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	1 Laporan	60.000.000	1 Laporan	50.000.000	1 Laporan	155.000.000							
Harmonisasi Hubungan Dengan tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Kecamatan Pondokmelati)	Jumlah Laporan Pelaksanaan Hamonisasi Hubungan Dengan tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	12 Laporan	12 Laporan	436.972.000	12 Laporan	350.000.000	12 Laporan	400.000.000							
TOTAL				27.959.199.170		34.710.587.000		36.078.501.566		38.402.362.013		40.380.996.948		42.040.770.299	

Sumber : Dokumen Perencanaan Kecamatan Pondokmelati Tahun 2025-2029, diolah

Paraf Koordinasi	
Camat Pondokmelati	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	



Tabel 4.4 Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME		KEGIATAN/SUB KEGIATAN KECAMATAN	KET.
1	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatnya efektivitas pelayanan masyarakat di wilayah kecamatan			
			1.1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	
				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	
			1.2	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	
				Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal Yang Terkait Dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum di Kecamatan Pondokmelati	
2	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Meningkatnya LKM yang mendukung pelayanan publik			
			2.1	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
				Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	
				Evaluasi Kelurahan	
				Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Jatirahayu)	
				Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	
			2.2	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				

Sumber : Dokumen RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025-2029, diolah

Penentuan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran dalam Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pondokmelati dilakukan dengan Merujuk pada indikator yang telah diseleksi dan relevan terhadap sasaran pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Kota Bekasi serta Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria. Dalam rangka mewujudkan ketenteraman dan Ketertiban masyarakat, indikator yang digunakan antara lain: *Persentase*

Paraf Koordinasi	
Camat Pondokmelati	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	



Peningkatan Zona Tertib di Wilayah Kecamatan, dan Persentase Peningkatan Wilayah yang Tertib. Indikator-indikator ini menjadi daya ungkit untuk Sasaran Kota Bekasi Terwujudnya ketenteraman dan ketertiban masyarakat. Dalam upaya mewujudkan kualitas pelayanan publik yang prima, indikator yang digunakan meliputi *Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan Pondokmelati, Profil Kelurahan yang terbaharui, dan Persentase LKM yang aktif.* Indikator-indikator tersebut dipilih karena mencerminkan secara langsung tingkat efektivitas dan efisiensi pelayanan yang diterima oleh masyarakat serta sejauh mana peran lembaga kemasyarakatan dalam mendukung pelayanan public Sementara itu, dalam upaya mendukung Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota, digunakan indikator seperti *Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Pondokmelati.* Indikator ini mencerminkan tingkat transparansi, efektivitas, dan efisiensi dalam pengelolaan kinerja instansi pemerintah di tingkat kecamatan.

4.2 KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.2.1 INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Pondokmelati Kota Bekasi Tahun 2025-2029 dan diperoleh dari indikator tujuan/sasaran yang terseleksi. Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Kota Bekasi tersebut, maka target IKU Kecamatan Pondokmelati seperti pada tabel berikut.

Tabel 4.5 Indikator Kinerja Utama PD

No.	Indikator	Baseline 2024	Satuan	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Ket.
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>
1	Persentase LKM Aktif yang mendukung pelayanan publik	n/a	Persen	65%	67%	69%	71%	73%	75%	
2	Persentase Peningkatan Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Pondokmelati	n/a	Persen	0,07	0,24	0,24	0,35	0,35	0,40	

Sumber : Dokumen Perencanaan Kecamatan Pondokmelati Tahun 2025-2029, diolah

Paraf Koordinasi	
Camat Pondokmelati	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	



BAB V PENUTUP

Rencana Strategis Kecamatan Pondokkelati Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program prioritas Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi periode 2025-2029. Selain dijadikan pedoman, Renstra Tahun 2025-2029 ini mempunyai kedudukan, peran dan fungsi yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, yaitu:

1. Secara substansial, memuat visi, misi, tujuan, sasaran, program prioritas, program perangkat daerah, pagu indikatif, dan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah;
2. Secara normatif, menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Pondokkelati mulai tahun 2026 hingga tahun 2030 yang merupakan tahun transisi;
3. Secara operasional, memuat arahan untuk peningkatan kinerja pemerintah yang menjadi tanggung jawab masing-masing Unit Kerja lingkup Kecamatan Pondokkelati dalam melaksanakan tugas dan fungsinya;
4. Secara faktual, menjadi tolok ukur untuk menilai capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan 5 (lima) tahun ke depan.

Kaidah pelaksanaan Rencana Strategis Kecamatan Pondokkelati 2025-2029, antara lain sebagai berikut :

1. Setiap Perangkat Daerah serta masyarakat termasuk dunia usaha di lingkungan Kota Bekasi diharapkan dapat berkontribusi terhadap pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan untuk 5 (lima) tahun ke depan;
2. Dalam menyusun Renstra PD, setiap Perangkat Daerah wajib melakukan penjangkauan aspirasi masyarakat dan dunia usaha dalam forum-forum konsultasi, dengar pendapat publik, dan forum lintas pelaku sesuai dengan kebutuhannya masing-masing

Bekasi, 2025
Camat Pondokkelati,

Heryanto, A.P., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19750717 199603 1 003